

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Serangkaian analisis telah peneliti lakukan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian, sehingga pada akhirnya menghantarkan peneliti pada kesimpulan dari penelitian. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan perangkat analisis framing milik Pan dan Kosicki serta dilengkapi dengan konsep framing Dietram Scheufele mengenai pemberitaan kasus gizi buruk di NTT, maka peneliti dapat menguraikan beberapa kesimpulan hasil dari rangkaian analisis yang telah dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Dalam membingkai kasus gizi buruk, *Pos Kupang* lebih menekankan unsur apa yang terjadi (*what*) dan siapa yang terlibat (*who*). Ketiga berita yang menjadi obyek penelitian menunjukkan kemiripan pola yang mengedepankan kedua unsur tersebut. Hal ini pun diakui *Pos Kupang* dalam bukunya bahwa berita-berita yang ditulis wartawan *Pos Kupang* lebih didominasi unsur *who* dan *what*, siapa membicarakan tentang apa, atau apa yang terjadi dan siapa yang terlibat, tanpa lebih jauh mencermati mengapa (*why*) dan bagaimana (*how*) sampai peristiwa itu terjadi⁶⁰.
2. *Pos Kupang* dalam melakukan pemberitaan mengenai gizi buruk lebih mencerminkan pergolakan pendapat di kalangan para pakar atau mereka yang punya otoritas, ketimbang pendapat para korban yang bersangkutan

⁶⁰ Kleden, Tony. Ibid. P:130.

(dalam konteks ini mereka yang menjadi korban kasus gizi buruk). Misalnya, teks berita yang menjadi kajian peneliti yang lebih banyak memberitakan keberhasilan rumah sakit dalam merawat pasien gizi buruk. Begitu pula dengan teks berita lain yang juga sibuk membicarakan bantuan yang diberikan kepala daerah bagi pasien gizi buruk, sedangkan pendapat pihak-pihak yang menjadi korban sendiri nyaris dilupakan.

3. Pos Kupang sebagai media lokal kurang menaruh perhatian pada kasus gizi buruk di NTT sebagai *problem* yang nyata. Dilihat dari *time frame* pemberitaan kasus gizi buruk yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, hanya terdapat 3 berita di halaman muka yang berbicara mengenai gizi buruk. Sementara dalam wawancara dengan peneliti, Tony Kleden, Manajer Produksi dan Redaksi menyatakan bahwa Pos Kupang sangat peduli terhadap kasus gizi buruk walaupun disisi lain beliau juga mengakui bahwa mereka (Pos Kupang) tidak memiliki agenda khusus terkait kasus gizi buruk, atau dengan kata lain kasus gizi buruk belum menjadi perhatian khusus dalam agenda pemberitaan Pos Kupang.

Agenda dalam arti merancang sebuah liputan besar dalam gizi buruk tidak. Mungkin juga belum, artinya merancang khusus ke depan besar dalam gizi buruk tidak. Tapi hari demi hari, itu selalu menjadi perhatian kita. Tanpa dirancang pun itu sudah menjadi perhatian pos Kupang. Kalau ada kasus gizi buruk ya diberi tempat, kita tetap memberitakan itu. Karena kita merasa bahwa itu terkait dengan kepentingan banyak orang, terkait dengan kepentingan publik, kebijakan anggaran, keberpihakan kepala daerah, kinerja para kepala instansi mereka seperti apa. Kita akan sangat terganggu kalau ada yang menderita gizi buruk sekian banyak orang gizi buruk (Tony Kleden, Manajer Produksi dan Redaksi. Wawancara 3 Agustus 2010).

Pihak Pos Kupang meyakini bahwa mereka belum memiliki rancangan untuk menempatkan kasus gizi buruk ke dalam agenda peliputan yang besar. Namun, kasus gizi buruk tetap menjadi perhatian dan Pos Kupang akan selalu memberitakan terkait kepentingan publik.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian mengenai kasus gizi buruk di NTT menggunakan perangkat analisis framing model Pan dan Kosicki (pada level teks) dan konsep framing menurut Dietram Scheufele (pada level konteks), masih terbuka untuk disempurnakan dengan menggunakan perangkat analisis framing yang lain. Selain itu, penelitian mengenai kasus gizi buruk ini bisa juga dikaji menggunakan metode penelitian lainnya seperti analisis isi (*Content Analysis*), dan analisis wacana (*Discourse Analysis*).

Dalam penelitian ini, peneliti lebih banyak membahas mengenai sudut pandang surat kabar harian *Pos Kupang* dalam membingkai peristiwa gizi buruk di NTT. Masih mungkin bila diadakan penelitian mengenai kasus gizi buruk dengan menganalisis dari sudut pandang masyarakat yang mengalami peristiwa tersebut. Atau dari pihak pemerintah kaitannya dengan penanggungjawab penanganan kasus gizi buruk.

Pada prinsipnya, peneliti merasakan masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penelitian mengenai kasus gizi buruk di NTT. Meskipun demikian, harapan peneliti bahwa hasil penelitian ini dapat berguna bagi banyak pihak, khususnya untuk kepentingan akademis.

Dalam proses penulisan, peneliti menyadari penelitian ini masih terdapat banyak kelemahan serta kekurangan. Pada proses analisis teks, peneliti mengalami kesulitan dalam menghubungkan kalimat dan kata serta menggali makna yang terdapat dalam teks berita, karena proses ini menuntut tingkat ketelitian serta kecermatan yang tinggi agar dapat menemukan frame media yang sesuai. Selanjutnya pada proses penggalian data di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa kesulitan seperti terbatasnya waktu untuk melakukan wawancara dengan narasumber oleh karena kesibukkan masing-masing. Selain itu, melakukan verifikasi langsung dari penulis yang menulis teks berita yang menjadi obyek penelitian pun tidak dapat dilakukan peneliti, karena kesulitan untuk melakukan wawancara dengan yang bersangkutan karena faktor keberadaan penulis yang sedang menjalani tugas di luar kota.

Untuk pihak SKH Pos Kupang, peneliti menyarankan agar pihak Pos Kupang terus melakukan inovasi maupun perbaikan-perbaikan dalam pengemasan berita. Sebagai koran lokal, Pos Kupang beserta awak redaksinya diharapkan kedepannya tidak berhenti belajar untuk memperbaiki kualitas liputan dan memperkaya wawasan agar mampu memaparkan persoalan dari berbagai sisi. Dengan demikian, hasil liputannya akan lebih kaya informasi dan semakin berbobot bagi masyarakat baik di NTT maupun seluruh Indonesia.

C. SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan peneliti adalah bentuk penelitian pada topik yang sama namun menggunakan metode *Fokus*

Group Discussion (FGD). Menurut peneliti, metode ini masih jarang dipergunakan. Namun metode ini memiliki keunggulan dalam meneliti tanggapan di tingkat *audiens*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Kleden, Tony, Maria M. Banda, Dion DB Putra – Editor. 2007. *15 Tahun Pos Kupang Suara Nusa Tenggara Timur*. Kupang: PT Timor Media Grafika.
- Maleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- McQuail, Denis. 1987. *Teori Komunikasi : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKiS.
- Potter, James. 2001. *Media Literacy*. Edisi II. California : Sage Publication.
- Setianti, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Siregar, Ashadi. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Subagyo, Joko P. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhandang, Kustadi. 2004. *Pengantar Jurnalistik : Seputar Organisasi, Produk, dan, Kode Etik*. Bandung: Nuansa.

Jurnal

- Scheufele, Dietram A. 1999. *Journal of Communication : Framing as a Theory of Media Effects*. USA: International Communication Association.

Skripsi

Palmasari, Fransiska Marta. 2007. *Relokasi Kawasan Parangtritis dalam Surat Kabar : Analisis Framing Relokasi Kawasan Parangtritis dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dan Bernas Jogja*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Arifin, Pupung. 2008. *Profiling Nurdin Halid dalam Editorial Bola. (Analisis Framing Pencitraan Nurdin Halid dalam Ulasan Rubrik "Catatan Ringan" dan "Usul-Usil di Tabloid Olah Raga Bola Terkait dengan Kasus Pidana Ketua Umum PSSI")*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Noveina Silviyani. 2008. *"Pers dan Konflik Perang Suku di Timika" (Analisis Framing tentang Pemberitaan Konflik Perang Suku di Kwamki Lama, Timika dalam SKH Lokal Radar Timika)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nayoan, Yoan, A.D. 2009. *Profiling Pelibat Wacana Kelangkaan BBM di Banjarmasin dan Sekitarnya (Analisis Framing Pencitraan Pelibat Wacana Kelangkaan BBM di Banjarmasin dan Sekitarnya Terkait Perannya Sebagai Penyebab Kelangkaan BBM dalam Pemberitaan Surat Kabar Harian Banjarmasin Post Periode 15 Juni-31 Juli 2008)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Artikel Internet

Lirik kolam susu

<http://www.lyrics007.com/Koes%20Plus%20Lyrics/Kolam%20Susu%20Lyrics.html> (22 Januari 2009)

Presiden Republik Indonesia. 1999. *UU No.22/1999 Tentang Pemerintah Daerah*.

http://72.14.235.104/custom?q=cache:rQHMj2kIHxsJ:www.pemko-batam.go.id/Undang/move_uu/UU22Thn1999.pdf+undang-undang+otonomi+daerah&hl=en&ct=clnk&cd=14&client=pub-4705872406429013 (29 September 2008)

Kondisi Pendidikan

http://nttprov.go.id/provntt/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=113 diakses 14 Juni 2011

Korban Tewas Akibat Gizi Buruk

<http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/16/1/119067> (9 September 2008)

Ribuan Anak Balita di NTT Alami Gizi Buruk

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0505/27/daerah/1776829.htm>

(9 September 2008)

Kupang Kota Terkorup

http://www.poskupang.com/index.php?speak=i&content=file_detail&jenis=6&idnya=17622&detailnya=1 (22 Januari 2009)

Perspektif 20% NTT

<http://www.nttprov.go.id/download/PERSPEKTIF%20NTT%202008.pdf>

(diakses tanggal 4 januari 2011)

Cermin Dunia Kedokteran

http://www.kalbe.co.id/files/cdk/files/06_PenatalaksanaanBusungLaparPadaBalita.pdf/06_PenatalaksanaanBusungLaparPadaBalita.html (diakses tanggal 17 februari 2011)

Artikel Surat kabar

SKH. Kompas. *Aku Ingin Kembali ke Sekolah* (Kriminal). Selasa, 10 Februari 2009. Hal. 1.

SKH. Kompas. *Dihidupkan, Program Masa Lalu yang Baik*. Jumat, 10 Juni 2005.



RSUD Ruteng Rawat Balita Marasmus

Senin, 15 September 2008, halaman muka

Ruteng, PK –Tim medis RSUD Ruteng merawat Kevin Lai (1,2 tahun) pasien gizi buruk tipe marasmus. Bayi asal Desa Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan berat badan 5,5 kg ini dirujuk dari puskesmas Borong.

Pantauan *Pos Kupang*, Sabtu (13/9/2008), Kevin, buah kasih Yanti Maria Tiu (22) itu, dirawat di ruang rawat inap anak-anak. Kevin sudah dipasang infus sebagai alat injeksi obat dan makanan, karena dirinya belum bisa diberi air susu ibu (ASI). Kevin yang terbaring ini hanya didampingi ibunya, Yanti Maria Tiu, sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia. “Kevin pernah dirawat di Puskesmas, namun tidak berubah sehingga kami kesini”, kata Yanti.

Salah seorang dokter spesialis anak di RSUD Ruteng, Wayan Gustawan mengatakan, Kevin sudah dirawat sejak Selasa (9/9/2008) dan menderita gizi buruk tipe marasmus. “Tidak ada gejala klinis sehingga dia dikategorikan gizi buruk positif dengan tipe marasmus”, katanya.

Fase penanganan tahap pertama (minggu pertama), katanya, adalah fase stabilisasi. Pasien diberikan nutrisi berupa susu atau Formula 75, pemberian obat anti infeksi diberikan dan juga menstabilkan gula darah selain penanganan gangguan pencernaan serta dehidrasi.

“Fase stabilisasi ini dilanjutkan dengan fase transisi hingga fase rehabilitasi. Kita akan lakukan perawatan sesuai tahapan sampai pasien pulih”, ujarnya.

Hal senada dikatakan Direktur RSUD Ruteng, drg. Dupe Nababan. “Penanganan pasien gizi buruk ini tidak dipungut biaya karena semua biaya dibebankan pada APBD”, kata Dupe.

Sejak Januari hingga September 2008, RSUD Ruteng merawat 12 balita gizi buruk, dua diantaranya meninggal dunia. (lyn)

MASALAH GIZI DI MANGGARAI

Tahun	Gizi buruk	Gizi kurang
2007	1.009	8.207
2008	241	2.779

Pemkot Kupang Tanggung Biaya Pasien Gizi Buruk.

Kamis, 25 September 2008, halaman utama

Kupang, PK-Pemerintah kota (Pemkot) Kupang menanggung semua biaya, baik obat-obatan maupun biaya perawatan selama pasien gizi buruk dirawat di rumah sakit di wilayah Kota Kupang.

Hal ini disampaikan oleh Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe, saat ditemui di Rumah Sakit Umum (RSU) Prof Dr. WZ Johannes-Kupang, Rabu (24/9/2008).

Saat itu Daniel Adoe mengunjungi pasien gizi buruk, Rambu Keke (4 tahun) dan Petrus Pello Edon (3 bulan). Ikut dalam kunjungan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, dr. Dominggus Sarambu dan beberapa petugas dari Puskesmas Sikumana.

Walikota menyatakan, semua biaya obat dan biaya perawatan, berapa pun besarnya merupakan tanggungan Pemkot Kupang. Pemkot Kupang, lanjut Daniel Adoe, telah mengalokasikan dana kesehatan untuk masyarakat yang masuk kategori keluarga prasejahtera.

Semua masyarakat miskin di Kota Kupang, tegas Daniel Adoe, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Dan, lanjutnya, bagi masyarakat yang belum memiliki kartu pelayanan gratis dari pemkot Kupang, cepat urus di kelurahan.

“Saya tegaskan, pihak kelurahan jangan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan kartu pelayanan kesehatan gratis. Jangan sampai masyarakat meninggal dua, karena pihak kelurahan lamban memberikan pelayanan,” tandas Daniel Adoe.

Sebelumnya, *Pos Kupang* memberitakan, dua orang pasien gizi buruk yang berusia dibawah lima tahun, masing-masing, Petrus Pello Edon (3 bulan) warga RT 1/RW 5, Labat, kelurahan Bakunase dan Rambu Keke (4 tahun), Warga RT 1/RW 1, Kelurahan Oepura, menjalani perawatan intensif di RSU Kupang. Kedua pasien itu dirawat di ruang perawatan kelas III anak.

Obe Polus Keke, orang tua Rambu Keke, saat ditemui di IRD sekitar pukul 12.21 Wita, menuturkan, anaknya menderita gizi buruk sejak lama. Namun kali ini baru dibawa ke RSU Kupang. Anaknya itu baru dibawa ke rumah sakit, karena kondisi fisiknya semakin memburuk.

Rambu keke dilahirkan prematur, sewaktu umur kandungan masih tujuh bulan. Sejak dilahirkan hingga usia empat tahun, Rambu kurang mendapat asupan makanan bergizi. Hal ini menjadi salah satu penyebab, sampai sekarang Rambu belum bisa duduk. Saat ini berat badannya hanya empat kilogram.

“Saya ini seorang penjaga malam di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI). Keadaan ekonomi kami yang menjadi salah satu sebab kami tidak bisa antar anak kami ke rumah sakit atau puskesmas,” tuturnya.(den)



Gizi Buruk, Dua Meninggal Dunia
08 Januari 2009, halaman utama.

Waingapu, PK-Dua dari enam pasien gizi buruk yang dirawat selama sepekan di Rumah Sakit Umum (RSU) Imanuel Matawai, Waingapu, Sumba Timur, meninggal dunia. Pasien pertama, Yustina Ina, meninggal pada awal pekan ini. Sementara Yayan (1,5), balita asal Anakalang, Sumba Tengah, meninggal dunia, Rabu (7/1/2009) pagi.

Ibu kandung Yayan yang ditemui di RSU Imanuel, kemarin siang, mengatakan, anaknya dilarikan ke rumah sakit karena lemas akibat tidak ada nafsu makan. Sebelum dirawat di Rumah Sakit Imanuel, katanya, Yayan sempat dirawat di Puskesmas di Sumba Tengah. Namun karena tidak ada perubahan, korban terpaksa dilarikan ke RSU Imanuel, Waingapu.

Direktur RSU Imanuel, dr.Dani, yang ditemui secara terpisah mengaku, korban dibawa ke RSU dalam kondisi kritis. "Pasien sudah dalam kondisi kritis karena dehidrasi berat. Berat badan korban hanya tiga kilogram. Kita sudah berupaya menolong, namun kondisinya sangat berat. Bahkan korban sampai mengeluarkan feses (kotoran) melalui saluran pencernaan atas (refluks)", kata Dani.

Dani mengatakan, 80 persen dari anak-anak dan balita yang dirawat di rumah sakit tersebut adalah anak-anak gizi kurang. Akibat asupan gizi yang sangat rendah, kata Dani, daya tahan tubuh anak melemah dan mudah terjangkit berbagai penyakit.

Kepala Bangsal Anak, Albina Ngindang, mengatakan, dalam sepekan terakhir pihaknya menerima dan merawat enam penderita gizi buruk dengan berbagai penyakit ikutannya. Dari enam pasien tersebut, empat berhasil diselamatkan. Kalau selama satu bulan terakhir, kata Albina, sudah 10 orang pasien gizi buruk yang dirawat di rumah sakit tersebut.

Pasien gizi buruk yang saat ini masih bertahan di RSU Imanuel, yakni Arga Setiawan, balita usia sembilan bulan asal Kambaniru. Putra keenam pasangan Marta Wolo dan Ruben Rohi ini, beratnya hanya empat kg. Menurut Marta, pada bulan sebelumnya berat Arga sempat naik 0,4 ons, namun turun lagi dalam sebulan terakhir.

Marta mengaku, Arga dilahirkan dengan pertolongan dukun terlatih. Namun setelah lahir, ia rutin ke posyandu. Marta yang sehari-hari bekerja sebagai petani mengakui di posyandu pernah mendapat bubur kacang hijau. Namun setelah Arga lahir, dia dan bayinya tidak pernah lagi mendapat makanan tambahan. "Kita ke posyandu hanya menimbang. Setelah itu pulang," katanya.

RSK Lindimara dalam sebulan terakhir merawat tiga pasien gizi buruk. Direktur RSK Lindimara yang ditemui beberapa hari sebelumnya, mengaku kondisi para korban sudah membaik dan tidak ada yang sampai meninggal dunia. (dea)



TRANSKRIP WAWANCARA

P = Peneliti

N = Narasumber

Pemimpin Redaksi

P : Apa tugas pemred sejauh ini?

N: Pemred, pemred itu kan tugasnya itu di redaksi *e* bertanggung jawab atas seluruh pemberitaan, bukan pentingnya itu ada di tanggung jawab itu jadi arah pemberitaan, pengembangan berita, desain berita, itu tanggung jawab dibawah dia, dia bertanggung jawab, dia juga sebetulnya kan mengimplementasikan, orang yang bertugas sebetulnya mengimplementasikan atau menerjemahkan visi misi dari sebuah media ke dalam bahasa berita. Jadi visi misi sebuah koran adalah ini. dia coba menerjemahkan itu ke dalam bahasa berita. pemberitaannya bagaimana

P : Jadi semacam ideologi begitu,

N : Ya...ya... jadi artinya visi misi kita. Kan setiap media tuh kan punya visi misinya to, dia coba menerjemahkan visi misi itu ke dalam bahasa berita. Melalui apa, desain beritanya, perencanaan peliputannya, juga dia bertanggung jawab atas seluruh isi berita.

P : Implementasinya ke pemberitaan dari visi misi

N : Jadi visinya sekian, jadi maksud saya adalah supaya berita, rancangan berita, peliputan berita tidak boleh keluar dari visi misinya, jangan terlalu lari jauh dari misinya *e*.

Umpamanya kita disini, salah satu yang menjadi kebijakan *polese* berita adalah berita-berita perkosa umpamanya tidak boleh *sampe* di halaman depan itu itu *polese* sudah menyangkut *polese* to itu harus dipatuhi artinya kita ini yang sebetulnya pemred dengan para redaktur pelaksana, para redaktur itu coba menjaga itu. Ini *polese* pemberitaan kita sekian pemeriksaan tidak boleh *sampe* halaman depan. Dia itu dikemas sekian sehingga yang menonjol adalah simpati, empati orang terhadap berita itu Bukan lagi bikin dia tambah susah. Jadi kita, pers, Pos Kupang jangan lagi memperkosa dia lagi untuk kedua kali, setelah jadi korban perkosaan fisik, jangan lagi diperkosa oleh pers.

Itu salah satu bagian kecil dari visi misi yang *menyata* dalam *polese* lalu itu dijaga oleh pemred, para redaktur pelaksana, para redaktur dan para wartawan. Contohnya begitu kira-kira.

P : Sejauh apa kontrol pemred terhadap produksi berita?

N : Dia mengontrol seluruhnya kan ada mekanismenya kita umpamanya ada rapat pagi ya, mekanisme rapat pagi umpamanya kalau dia merasa bahwa ada yang harus dikembangkan, ada yang harus diliput dia tinggal kasi tau malam.

Besok kita rapat malam to, ada rapat malam besok tolong kembangkan ini berita ini...ini...ini... besarkan ini, ini direm dulu, *cooling down* dulu.

Keseluruhan dia tahu, dia musti tahu, dia tau darimana dia bisa menugaskan para redaktur pelaksana yang menerjemahkan apa yang dia mau kan, apa yang dia rencana. Para redaktur pelaksana kan di bawah dia. Mereka yang coba mengaktualisasikan, mengimplementasikan apa yang sebetulnya harapan dia, harapan menejemen, harapan bersama ke dalam liputan-liputan. Jadi dia pasti tau seluruhnya, dia wajib tau, dia yang menjadi ujung tombak dan dia yang bertanggung jawab terakhir.

P : Bagaimana pendapat anda pribadi mengenai kasus gizi buruk di NTT?

N : Gizi buruk e

Saya sebagai apa, posisi apa ini? dalam kait dengan...

P : Pribadi sendiri.....

N : Atau sebagai posisi sebagai orang di PK atau pun melihat itu dalam liputan pos kupang

P : Pendapat pribadi sebagai orang NTT

N : Itu Menyedihkan to, gizi buruk e

Kita ini sebetulnya dalam hampir seluruh variabel di sektor kesehatan itu, orang NTT itu sakit semua, dan buruk semua hampir-hampir sampai orang NTT itu identik dengan gizi buruk, busung lapar dengan sekian kondisi kita itulah. Itu ..itu ada..ada.. terjadi ee...bukan kita mengatakan membela diri bahwa itu tidak ada, tidak. Itu memang nyata terjadi. Masyarakat tidak hanya di kampung-kampung tapi di kota pun masih kita temukan anak-anak yang korban gizi buruk, tapi juga menurut saya harus juga diingat bahwa Gizi buruk itu terjadi tidak hanya karena orang tuanya tidak sanggup, tidak hanya, orang yang pegawai negeri juga, orang tua yang pegawai negeri, orang tuanya kita anggap mampu juga anaknya korban gizi. Berarti apa, itu berarti bahwa kesalahan itu terjadi pada orang tua mungkin dia tidak bisa mengurus.

Jadi orang tua yang berkemampuan baik juga anaknya itu terjadi juga

Jadi musti dibedakan betul yang disebut dengan gizi buruk itu apa? Anak yang mengalami kekurangan apa, zat apa yang dia kurang. Mungkin kita orang tau mampu tapi kita tidak kontrol kita punya anak makan mungkin dia mengalami kekurangan zat besi, zat ini, yang mengakibatkan dia gizi buruk. Makannya banyak, dia mainnya enak, orang tuanya mampu tapi tidak dikontrol oleh orang tua maka asupan terhadap bagi anak supaya dia tidak menjadi korban gizi buruk itu terjadi.

Jadi itu tapi yang paling berat adalah bahwa kekurangan makanan, orang tua tidak mampu itu yang sering, lebih banyak terjadi. Menyebabkan anak NTT itu gizi buruk, kekurangan gizi.

P : *Terus kalau menurut pandangan om selama ini gizi buruk terus dipelihara atau bagaimana?*

N : Banyak orang bisa berpikir seperti itu. Tapi saya sebetulnya tidak berpikir sejauh itu ya.

Banyak orang NTT tidak mampu, itu iya. Dan karena juga ada intervensi pihak luar, LSM, dinas kesehatan. Mereka mengintervensi untuk mengatasi korban-korban gizi buruk dengan memberi dia kacang hijau di posyandu-posyandu, susu dibagi. Tapi kalau ada yang berpikir bahwa ini dipelihara supaya ada proyek itu saya kira itu patut disesalkan dan itu tidak boleh terjadi

tapi bahwa kalau itu ada, itu boleh jadi juga ada, tapi saya bilang tadi. Itu sangat disesalkan kalau ada orang yang memelihara kemiskinan untuk mendapat uang. Berarti sebetulnya dia lebih miskin visi lebih miskin apalagi, dari pada ini, karena dia memanfaatkan kemiskinan orang lain untuk mencari uang.

P : Menurut anda siapa yang paling berpengaruh besar dalam kasus gizi buruk ini?

N : Penyebab terjadinya kah?

P : Paling berpengaruh?

N : ya menurut saya, orang tua sebetulnya paling berpengaruh terhadap kondisi anak sehingga dia mengalami gizi buruk. Juga kita tidak bisa menyalahkan orang tua, situasi kemiskinan dia, kondisi ekonomi dia, situasi ekonomi orang tua, pendapatan dia. Itu juga mengakibatkan mereka juga mengapa mereka juga tidak bisa memenuhi seluruh asupan gizi yang dituntut oleh seorang anak.

Jadi ini kan sebetulnya berkaitan situasi miskin menyebabkan daya beli rendah orang tua juga tidak bisa memenuhi seluruh asupan gizi yang dituntut oleh seorang anak supaya dia bebas dari gizi buruk. Saya kira itu.

P : Independensi dari Media menurut Pos Kupang bagaimana? Misalnya PK tidak menjadi corong bagi siapapun, tapi lebih berpihak pada kebenaran atau bagaimana?

N : Secara umum kah?

P : Saya kira sejauh ini, kami-kami ini masih cukup mengawal supaya pos kupang tetap independen.

Saya cerita *e.* ini untuk mengukur indeks demokrasi indonesia NTT (IDI). Salah satu syaratnya atau kalau melakukan survey di media. Media yang disyaratkan adalah media yang independen, oplah terbesar.

Di NTT yang dipilih adalah Pos Kupang, itu artinya Pos Kupang masih lebih independen dengan oplah yang lebih besar dan masih lebih dipercaya untuk konteks NTT sehingga orang memilih pos kupang, kalau mau meliput ntt, koran yang mau dirujuk adalah Pos Kupang.

Karena independensinya masih bisa dipercaya. Lalu juga saya kira pembaca yang sebetulnya menilai koran mana di ntt itu yang masih independen, masih bisa dipercaya.

Kita lebih dengan visi misi kita. Kita memang koran umum. Yang kita bela adalah kepentingan publik, itu artinya diterjemahkan lebih jauh dalam bahasa berita itu adalah *angle-angle* berita, berita-berita yang mana, Berita-berita yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, gizi buruk tadi salah urus dimana, itu yang lebih banyak kita sentuh.

Jauh sekali porsi terhadap berita-berita yang *talking news*, pejabat-pejabat omong-omong dengan pejabat itu kita itu bagi Pos Kupang itu berita-berita kelas dua. Bukan tidak penting tapi penting juga kepentingan biasa jauh lebih daripada kepentingan publik.

Masih ada relevansinya apakah harus publik pantas dan mengetahui suara dari seorang pejabat atau tidak. Itu yang membuat kita tetap dipercaya dan

saya kira selama ini Pos Kupang jarang sekali digugat atau dicaci maki karena tidak independen dan kita itu tabu, haram membela kepentingan-kepentingan tertentu.

Kita mau jujur pemerintah kita ini orang Flores, orang katolik tapi Pos Kupang tidak ada urusan dengan. Kita masuk sini kita tinggalkan semua baju agama, baju suku. Kita tidak ada urusan dengan itu. Di pintu ini, Wartawan, karyawan semua kru disini adalah bebas, artinya tidak boleh terlibat dalam afiliasi politik, tidak ada urusan.

Kita kesini adalah bekerja sebagai profesional. Jadi, sampai pintu Pos Kupang kau kasi tinggal kau itu dari mana, kau kasi tinggal kau punya agama, kau kasi tinggal kau mungkin kau terlibat dalam politik, tidak ada urusan.

Kita disini aturan jelas, rujukan jelas, profesionalisme yang kita junjung di tempat ini. Sehingga kita juga tidak segan-segan memberhentikan anggota panwas yang tidak mau megundurkan diri, kita berhentikan, terjadi dan terjadi. Anggota panwas yang tidak mau, ibu silahkan memilih, anda silahkan memilih, mau jadi Pos Kupang, ya tinggalkan itu, ya tinggalkan Pos Kupang, memilih silahkan, kita tidak larang. Tapi pilihan jelas, ketika masuk sini, memilih disini, semua ikut. Kita menjunjung asas profesionalisme.

P : Apa yang melatarbelakangi Pos Kupang tetap mengangkat kasus gizi buruk dalam agenda pemberitaan? Selama ini masih tetap memberitakan gizi buruk

N : Tetap itu, pendekatan kita adalah pendekatan jurnalisme dengan seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau itu memang menyangkut kepentingan dan kepentingan banyak orang, kita pasti beri tempat. Kenapa kita sembunyi, Kita pernah memberitakan gizi buruk di Lembata, itu bupatinya marah-marah sampai itu kan meledak sampai di, ketika diangkat oleh Kompas lalu juga dilahap oleh TV-TV, bupatinya marah. Kita yang sudah mulai duluan e. Artinya bahwa Kita tidak ada urusan dengan pak bupati marah atau tidak, tapi kita berurusan dengan begitu banyak orang yang tidak makan. Kalau orang sudah makan dengan buah bakau, kalau Pos Kupang diam saja, siapa lagi yang bisa membantu mereka, yang bisa membuka mata orang lain bahwa Di Lembata, di Ille Ape ini terjadi begini-begini. Stok pangan habis, beras habis, jagung habis, ubi habis. orang turun ke laut untuk makan buah bakau. Kalau orang di sumba sudah masuk hutan lalu dia gali ubi Iwi itu, yang racun itu. Kalau kita tidak bilang bahwa mereka sudah kekurangan pangan itu bagaimana. Hal lain kalau pemerintah bisa menjawab bahwa nasi, jagung, ubi bukan satu-satunya makanan alternatif. Iwi kalo bisa dikelola itu bisa menjadi makanan alternatif jadi persoalan bukan bagaimana mengalihkan, mengolah Iwi menjadi makanan pokok, tidak. Mereka kalau sudah masuk hutan dan cari Iwi artinya bahwa mereka punya lumbung sudah kosong, masalahnya kan itu kan. Jadi kalau orang di Lembata sudah turun ke pantai mencari buah bakau artinya mereka tidak ada nasi lagi, tidak ada jagung lagi, tidak ada beras lagi, tidak ada ubi lagi. Itu paling terakhir, jalan paling terakhir yang bisa menyelamatkan mereka adalah buah bakau, mempertahankan hidup. Kalau kita mengatakan bahwa, kalau media mengatakan bahwa ah...itu kan makanan alternatif, mereka belum sampai pada taraf gizi buruk, saya kira kita *fare* saja to. Pemerintah juga bisa

mengaca diri, masyarakat saya ini, memang kalau dia sudah makan bakau kira-kira di lapar atau tidak, dia masih punya stok atau tidak. Itu saya kira pemerintah mustinya jujur dengan dirinya.

P : Apa yang melatarbelakangi Pos Kupang tetap mengangkat kasus Gizi buruk?

N : Jadi keprihatinan. Media itu kan sebetulnya punya empat tujuannya ya, yang saya kira saya sudah tidak perlu jelaskan lagi to. Menyebarkan informasi, kontrol, hiburan dengan satu lagi edukasi.

Saya kira, untuk konteks NTT media musti lebih banyak bermain pada tataran kontrol. Hiburan saya kira itu sudah, TV punya hiburan itu sudah sampai kebablasan sudah sampai infoteinmen lagi sekarang ada ribut apakah itu jurnalisme atau tidak. Infoteinmen e.. Infoteinmen sudah kelewat.

Saya kira iya. Kontrol, media untuk konteks NTT saya kira menurut saya kontrol itu adalah fungsi yang paling penting yang harus dimainkan oleh media. Kontrol itu adalah fungsi yang paling penting yang harus dimainkan oleh media. Kenapa ? karena praktek birokrasi kita itu amburadul, korupsi NTT nomer berapa itu kamu tau tho?

Tapi juga tidak pernah ada pejabat publik yang bisa masuk penjara karena korupsi. Sejauh ini saya kira baru dua yang masih ditahan. Bupati Banunaek, oh sudah ini dia masuk. Bupati Ende yang masih berperkara, mantan bupati Ende, Paulus Domi, masih disidang. Tapi pejabat-pejabat mana yang pernah terlibat kasus korupsi dan bisa masuk penjara. Di Belu kamu bisa baca Pos Kupang hari ini to, kasus judi hakim kasih dia tiga bulan tidak sampe, hari ini sudah ditangkap.

Jadi kita masih lebih ideal dan lebih mestinya lebih gencar pers itu memainkan peran kontrol kontrol itu yang saya kira untuk konteks NTT media lebih banyak bermain di area itu. Informasi saya kira iya, tetap dgn sendirinya, informasi. Hiburan juga saya kira juga sudah lewat jauh sekali. Edukasi juga dengan sendirinya sudah pasti jadi. Kontrol yang perlu lebih mendapat tekanan memainkan peranan yang harus lebih dimainkan oleh media untuk konteks ntt.

Sekarang kamu lihat kita dengan 16 kabupaten e. Mekar terus mekar terus, dari 12 sudah menuju, sudah hampir 20 kah, sudah hampir 20 kabupaten. Tujuan dari pemekaran sebetulnya kan supaya kue pembangunan itu dibagi lebih merata, lalu juga dan karena itu juga ada efeknya adalah tingkat kesehatan masyarakat.

Pemerataan to, tapi apa yang terjadi kita boleh dibilang ini gagal kan. Lembata dia mekar dari Flores Timur, hampir 10 tahun ini, dia hancur-hancuran. Rote juga mekar dari kabupaten Kupang korupsi paling banyak, masih banyak kasus yang belum bisa diungkap, masalah tingkat kesejahteraan juga sangat buruk. Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai Barat. Jadi apa yang sebetulnya digagas dan dirancang sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu belum terbukti sejauh ini. Karena itu kita mengambil peran kita pada fungsi kontrol, kita mau melihat apa NTT ini sudah saatnya butuh pemekaran? Apa Rote masih mekar? Apa Adonara masih mekar? Jadi kita lebih bermain pada fungsi itu, kita mau melihat.

P : Apa pendapat anda mengenai kinerja pemerintah daerah dalam kasus gizi buruk?

N: Pemerintah ini apa yang kurang. Dinas, teknis itu ada semua, dinas kesehatan, dinas tanaman pangan sampai juga urus bencana itu mereka bentuk. Apa badannya itu, penanggulangan bencana, itu ada. Jadi dari sisi organisasi sebetulnya, pemerintah tidak boleh, tidak bisa, tidak mereka tidak bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini. Karena mereka punya organ-organ yang lengkap, struktur organisasi di birokrasi itu cukup baik. Kalau dinas kesehatan, mestinya yang terlibat disitu adalah dinas kesehatan, pertanian.

Yang terjadi adalah kalau sudah terjadi itu mereka baku tolak. Dinas kesehatan bilang, kami hanya urus orang sakit jadi mereka hanya bilang nanti dia sampai di rumah sakit dia kurang gizi baru kami tangani. Sebelum itu kami tidak ada urusan, dia ada di rumah dia makan apa bukan urusan dinas kesehatan. iya to? Itu urusannya pihak lain. Berarti apa? Ini berarti bahwa apa yang kita sebut dengan sinergi, sinergisitas di pemerintah itu tidak terjadi. Masyarakat itu tidak boleh dengar bahwa dinas tidak ada urusan, tidak boleh. Kamu ini ada untuk melayani masyarakat. Badan ini dibentuk untuk melayani masyarakat. Lalu sekarang kamu bilang bahwa kamu tidak berurusan dengan ini, itu bahasa-bahasa itu kan tidak boleh didengar oleh masyarakat. Itu tanda bahwa kamu tidak ada sinergi di tingkat birokrasi sampai orang gizi buruk. Rakyat tidak mau tau, ini urusannya siapa. Tapi bahwa kami ini kamu yang mengatur. Rakyat ini diatur oleh pemerintah, pemerintah atur bagaimana. Dinas-dinas, teknis itu. Jadi tidak boleh terjadi bahwa kami ini urus mereka sakit dulu baru kamu pergi urus. Kami ini hanya pasok beras, ini beras masak di dapur bagaimana itu bukan urusannya Bulog. Itu urusan ibu PKK, ibu PKK bilang kami sampai disana tidak ada beras, berasnya buruk-buruk semua. Jadi berarti bahwa kamu tidak ada sinergi, birokrasi tidak bersinergi sehingga bisa duduk sama, mengatasi masalah bersama tidak terjadi. Kami punya organ sangat lengkap birokrasi sangat ini apa namanya sangat bagus, ada yang sudah sampai gemuk sekali, ada yang tidak perlu juga diadakan, birokrasi, ada badan ini musti diadakan. musti diadakan, tumpang tindih-tumpang tindih, jadi, lalu akibatnya adalah bahwa ini ini yang konyol. Maksud saya itu ironis sekali, organ birokrasi begitu banyak, tapi masalah gizi buruk, mengelolah saja tidak bisa, itu menurut saya aneh..

Jadi menurut saya adalah kasarnya kan pemerintah sebetulnya belum maksimal atau lebih kasar lagi pemerintah masih gagal mengurus masyarakat. NTT ini apa yang kurang, Flores itu dari ujung sampai ujung itu.... Jadi kita sebetulnya, pemerintah kita ini kan gagal ya. Kita hanya malu sekali mengatakan pemerintah kita ini gagal.

Flores itu ujung sampai ujung itu, pisang dengan ubi itu tebuang-buang e, tapi hanya untuk beli kerupuk orang Flores harus datangkan dari Surabaya.

Timor ini, asam Soe ini begitu berlimpah-limpah, tapi hanya untuk mendatangkan asam, kecap apa ya manisan asam musti dari Surabaya. berarti pemerintah tidak bisa mengelola potensi yang ada itu untuk kesehatan masyarakat. Di Flores Timur ikan itu limbah rua, ikan itu lebih banyak kirim

ke Jepang. Jadi sebetulnya efek jauh dari potensi itu untuk kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat itu masih jauh sekali.

Pertanyaan adalah pemerintah bikin apa? Dengan potensi yang begitu banyak, kamu bikin apa? Sebetulnya, pemerintah, mereka hanya menyibukan diri dengan mengurus diri sendiri. Dana kita punya dana Daudag itu 70 % untuk bayar mereka punya gaji, sisanya ini untuk proyek2,

sisanya nanti juga tidak sampai di bawah lagi. Ada pemerintah untuk apa?

70% anggaran, 80 % anggaran untuk masyarakat, eh untuk dana rutin kan, dana rutin itu ya untuk operasional kantor lah, gaji lah, ke masyarakat sedikit sekali. Kamu ada untuk apa? Kalau kamu bikin bengkok itu birokrasi, dana ini, kantor ini, badan ini..ini...ini...untuk apa?

Satpol PP, kepentingan langsung masyarakat dgn Satpol PP itu apa? Dia itu hanya untuk menertibkan pegawai negeri kan. Masyarakat tidak butuh itu Satpol PP, tapi dia punya kantor, punya staf sekian, kendaraan sekian, fasilitas sekian.

Kita mau berurusan dengan KTP ya. tiap kali kalau perpanjangan itu mulai dari RT lagi, lurah lagi, antre berbulan-bulan lagi. Jadi dulu kan pernah bilang ada sistem komputerisasi, kenapa tidak dipakai itu, orang skrg sudah pakai dengan data kan, daerahnya itu sudah data base. Kenapa hanya urusan ktp itu, mau perpanjangan lagi, bukan urus baru dari awal lagi, dari pak RT, Lurah. Padahal orang ini sudah lama, sudah 20 tahun ada disini, tinggal dibikin bagaimana registrasinya, supaya dimudahkan sehingga orang itu merasa dilayani. Kamu tau to orang di pemerintah itu dia punya semboyan itu, apa yang kalau bisa dibikin susah kenapa dibikin gampang. Iya kan? Jadi bikin sulit apa yang dibikin gampang sebetulnya kan. Masyarakat itu kalau ke kantor-kantor itu kasian mereka itu, pingpong sang pingpong sini. ini belum..ini belum...

Jadi memang menyedihkan, menurut saya itu, pemerintah masih gagal mengurus masyarakat. Saya kira iya, kita musti jujur dengan diri sendiri.

P : Apa pendapat anda mengenai kinerja instansi kesehatan (rumah sakit, puskesmas) dalam kasus gizi buruk?

N : Kesehatan, saya kira tolak ukurnya adalah seberapa jauh, seberapa baik tingkat kesehatan masyarakat NTT ya. Saya kira baik atau buruk dinas kesehatan sudah bekerja. Bekerja untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat NTT. Tapi juga saya kira kita bisa data memang masih sangat buruk. Tingkat kematian ibu anak itu NTT nomer satu, paling buruk. Tingkat kematian bayi itu juga buruk. Hampir semua variabel di kesehatan itu kita jeblok. Saya pikir, saya tidak perlu mengatakan bahwa seperti apa dinas kesehatan berperan, mari kita mengukur itu to. Benar bahwa banyak sekali variabel yang bisa memberi andil mengapa tingkat kesehatan NTT masih buruk. Tapi mari kita lihat variabel oh ukuran-ukurannya tadi. AKI (Angka Kesehatan Ibu dan Anak) kita buruk, Kematian ibu paling buruk, saya kira nomer satu dari belakang. Kematian bayi juga paling buruk. Tingkat apa lagi hampir banyak sekali variabel di kesehatan yang menempatkan NTT nomer buruk dari belakang. Saya bilang tadi, sudah atau belum baik atau tidak dinas kesehatan sudah melakukan banyak hal. Mungkin yang diperlukan adalah

lebih gencar lagi, kampanye-kampanye tentang kesehatan masyarakat mungkin lebih gencar lagi, dana-dana juga jangan lebih banyak urus proyek. Saya kira dalam skema anggaran itu ada tiga instansi dinas yang makan uang, bukan makan uang, membutuhkan uang paling banyak: PU, pendidikan dan kesehatan. Tapi kita bisa liat to pendidikan kita seperti apa. Ujian umum, kesehatan kita seperti apa. Salah dimana kamu sudah bikin apa? Kamu sudah bikin apa? Kalau kamu sudah bikin apa, Hasilnya ini bolongnya dimana? Itu tu yang tolong diperbaiki. Rumah sakit kita dimana-mana tapi kelasnya seperti apa rumah sakit ini?

Dokter disini di NTT ini kan bermasalah terus to, dokter PTT dikontrak sekian tahun hilang. Pemerintah ini tidak bisa, apakah pemerintah tidak bisa berpikir sekian, melakukan sekian, sehingga anak NTT itu dikasi studi, dikasi beasiswa. Pemerintah, ada beberapa pemerintah sudah melakukan itu e, di kabupaten. Jadi, supaya mereka datang, dokter PTT datang, dua tahun dia pergi. Ini anak tanah sendiri, supaya apa, supaya ini dia ada ikatan emosional, dan ini dia punya tanah, tanggung jawab dia, keprihatinan dia, kepedulian dia itu tumbuh. Kalau dia melihat sesama dia di orang Belu yang masih begini, kalau saya orang Belu saya melakukan apa. Itu hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh dibikin oleh dinas kesehatan, pemerintah, para bupati, kepala daerah disini, supaya mengangkat derajat kesehatan masyarakat NTT. Kita berharap dengan fakultas kedokteran Undana bisa ada dampaknya e, untuk mengangkat, mengatasi problem kesehatan di NTT, saya kira itu.

P : Apa pendapat anda mengenai balita yang menderita gizi buruk dalam kasus gizi buruk?

N : Masih tinggi saya tidak, terakhir saya tidak ini tapi...

NTT termasuk salah satu propinsi yang angka gizi buruk yang diderita balita itu masih sangat tinggi. Irian, NTB, Maluku, beberapa daerah lagi, propinsi lagi yang masuk kategori itu. Jadi kita harus menerima bahwa kita masih pada kondisi spt itu mengapa? Seperti saya jelaskan tadi banyak sekali variabel yang ikut terlibat, menjadi sebab mengapa ntt masih gizi, e balitanya masih gizi ini. Menurut saya juga adalah jg bahwa ada revolusi KIA ya, Kesehatan Ibu dan Anak. Itu yang lagi gencar dilakukan oleh gubernur dan dinas kesehatan revolusi KIA. Ini saya kira ini pikiran baik, jalan baik. Jadi kampanye besar-besaran supaya ibu hamil, ibu-ibu muda tau, dia itu kalau melahirkan, atau dia itu bersalin dia harus makan apa. Kalau dia hamil itu dia kunjung ke puskesmas itu berapa banyak kali, kunjungan puskesmas. Kalau dia kalau bersalin dia harus lari kemana.

Jangan di dukun, ee nanti resiko tinggi. Kalau toh ke dukun, sekarang kan dukun terlatih juga ada e dengan harus didampingi dengan bidan yang terlatih. Jadi itu revolusi KIA yang lagi gencar. Saya pikir ini yang harus didorong, harus terus didukung supaya angka kematian ibu melahirkan, angka gizi buruk balita juga bisa diatasi. Kalau dia bayi sudah sekian tahun, sekian bulan dia makan apa, kontrol bagaimana. Dikampung-kampung juga kan ada ibunya yang melahirkan kasih nenek yang pelihara, ibunya pergi merantau. Juga terjadi seperti itu, jadi seolah-olah mesin produksi. Hanya melahirkan anak kasih neneknya yang asuh. Ibu pergi merantau ke tempat lain, pergi ke

kota. Anak kalau diasuh oleh nenek berarti dia tidak dapat ASI kan. Nenek juga dengan dia punya pekerjaan, kapan dia minum susu, dia minum susu atau tidak juga kita tidak tau. Padahal umur 6 tahun itu 0 sampai 6 tahun itu kan Bullenese to. Lewat dari umur itu jaringan otaknya tidak terlalu berkembang, makin berkurang jaringan sekina persen, sekian persen. Jadi kalau sudah lewat dari 6 tahun jaringan otaknya tidak terlalu ini. Bulines sampai 6 tahun, ini ni vital ini. Jadi kalau umur balita tidak diperhatikan asupan gizinya, tidak diasuh dengan baik. Repot sekali masa depan, anak-anak punya masa depan itu repot sekali. Lebih banyak susu kaleng juga nanti anak bunyi seperti kaleng.

P : Apakah dalam pemberitaan Pos Kupang selalu memberikan porsi yang sama (*cover both side*)?

N : Bukan selalu, itu wajib. Bukan *cover both* saja tapi *cover all side*, bukan hanya dua pihak mestinya semua pihak yang terlibat dalam sebuah berita, sebuah kasus. Kita tidak segan-segan mendrop berita kalau tidak ada konfirmasi. Kalau terutama menyangkut kasus-kasus, karena kita jurnalisisme profesional syarat-syarat sebuah berita itu kita patuhi, kode etik jurnalisisme juga kita penuhi, supaya kita tidak dikomplain tidak dicaci maki karena berita itu tidak *cover both* atau *all side*. Itu sangat diharamkan. Itu peran kita di tingkat redaktur, editor itu sudah. Jadi itu bukan selalu tapi harus.

P : Pernahkah Pos Kupang diprotes oleh pihak-pihak yang diberitakan?

N : Bukan pernah, sering dan sampai digugat.

P : Bagaimana Pos Kupang menyikapinya?

N : Jadi kita ini sudah berurusan dengan pengadilan sudah beberapa kali, sampai duduk jadi terdakwa.

Pertama itu, kasus rumpun Belu itu tahun 2000. Kita gencar sekali memberitakan itu, kita tetap dengan *cover both side*, *cover all side*. Tapi ada pihak pengusaha yang merasa dirugikan lalu menggugat kita. Kita sampai disidangkan, sampai sidang pengadilan datangkan saksi ahli dari dewan pers. Supaya kau tau, hanya NTT yang pengadilan itu mengusir saksi ahli dari dewan pers, itu hanya terjadi di NTT. Saksi ahli dari dewan pers, itu hanya terjadi di NTT. Kita dengan *gentle* menghadapi itu, kita menang. Pengusahanya sampai dengan hari ini masuk penjara karena terlibat rumpun Belu.

Kasus lain lagi itu banyak sekali e, kita sampai terlibat sampai sana. Ada orang juga datang membawa surat teguran, ancaman, bahkan juga sampai bawa uang supaya meminta kita memberhentikan berita, memutar berita. Jadi, itu seperti itu. Jadi bukan hal yang luar biasa karena orang mengkomplain kita karena berita kita, tapi sikap kita adalah apa, jalan terus kalau kita patuh pada *cover both side* tadi, kebenaran, kepentingan umum lalu juga dengan kode etik jurnalistik. Kita tetap jalan, kita tidak ada urusan, kita tidak tergoda dan kita tidak pernah takut dengan ancaman atau apapun. Sejauh memang kita bekerja dengan benar mengikuti kaidahnya, kode etik jurnalistik juga dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Semua pihak kalau ini kita minta pendapatnya, kita minta komentarnya. Dan itu hal yang hampir tiap hari kita hadapi, biasa.

- P : Bagaimana respon pembaca Pos Kupang terhadap berita-berita mengenai gizi buruk selama ini?
- N : Psikologi pembaca di NTT itu kan, mereka juga suka berita-berita semacam itu. Secara umum, psikologi pembaca itu berita-berita seperti itu yang mereka suka. Pengungkapan kasus, korupsi, jadi Pos Kupang kalau sudah lama tidak mengungkap kasus korupsi itu mereka akan telpon, sms, wah ini Pos Kupang sudah tidak berani lagi, tidak lagi berani seperti koran lain karena tidak mengungkap lagi, tidak mengurus lagi. Bukan kita tidak berani, bukan masalah berani atau tidak berani. Kita punya porsi itu adalah berita, bukan kita punya porsi pergi tangkap orang. Beda, pergi tangkap orang adalah jaksa, polisi. Kita memberitakan apa yang dia lakukan, kalau dia belum lakukan, kita tinggal beritakan, sudah sekian lama jaksa tidak pernah, sudah tidak lagi, kasusnya sepertinya didiamkan. Tapi untuk urusan pergi tangkap orang itu bukan urusan kita. Pembaca seolah-olah, kesan saya, mengharapkan Pos Kupang itu berperan lebih dari sekedar memberitakan, menangkap orang, memprovokasi polisi supaya pergi tangkap orang, tidak, jangan. Kita sampai disini, porsi kita adalah disini. Kita tidak punya tangan untuk pergi tangkap orang untuk masuk penjara. Itu urusan orang lain punya. Kita sebetulnya mengkondisikan bahwa ini begini..begini...begini...sehingga orang lain yang merasa bertanggung jawab atas tugas dia, dia yang tergoda, dia yang musti di lecut untuk pergi menangkap orang, melakukan tugasnya. Pembaca sejauh ini cukup puaslah dengan berita-berita Pos Kupang. Masih pada kepentingan yang kita bela adalah kepentingan umum. Kita tidak terlalu afiliasi itu, kita tidak. Kita juga jarang sekali memberikan tempat pada berita-berita *talking news*. Itu berita-berita kelas dua, menurut kita disini itu berita-berita kelas dua. Omong-omong orang bosan juga ya. Orang mau lihat perkembangan ini sampai dimana. Di Belu ini kasus-kasusnya kok diam-diam saja, di Ende kita sudah sampai pada tahap ini sehingga, Pengusaha juga sampai ditangkap. Saya kira setuju atau tidak untuk konteks NTT, Pos Kupang jauh lebih berperan dalam fungsi kontrol sehingga menggiring sejumlah orang masuk penjara. Ade bisa banding dengan media lain apakah mereka cukup gencar membersihkan kasus-kasus korupsi. Pembaca lebih menilai Pos Kupang lebih menonjol dalam mengungkap kasus atau koran lain. Tapi sejauh ini mereka cukup puas dengan berita-berita Pos Kupang.
- P : Kalau berita kasus gizi buruk?
- N : Gizi buruk juga saya kira juga sama. Kita dengan menempatkan wartawan diseluruh daerah, minus Sabu. Seluruh daerah kita tempatkan wartawan. Gizi buruk juga menjadi salah satu agenda liputan Pos Kupang, selalu kita sapa. Ini kan kepentingan dengan banyak orang kan, kepentingan dengan hidup orang. Jadi kalau orang sudah gizi buruk lalu kita tidak beri tempat, kita merasa betapa berdosa. Karena itu juga gizi buruk juga tetap menjadi *agenda setting* dari pemberitaan Pos Kupang.
- P : Apakah ada respon langsung dari pembaca berupa komentar yang ditujukan pada redaksi? Jika ada, bisa ceritakan sedikit seperti apa komentar tersebut?
- N : Oh sangat ini, bukan hanya dari sini. Kita sebetulnya dengan berita-berita kita itu, gencar sekali orang dari luar, dari WHO, darimana-darimana, lembaga-

lembaga luar yang prihatin dengan gizi buruk. LSM-LSM juga banyak sekali yang masuk NTT juga karena berita Pos Kupang. Gizi buruk disini, mereka disini. Mereka juga kesini sering tanya, gizi buruk nya bagaimana, di kabupaten-kabupaten mana yang tingkat-tingkatnya begini-begini PAD, eh *income* perkapita masyarakatnya seperti apa, mereka sebaiknya intervensi kemana selalu biasanya mereka berkomunikasi dengan kita, kita beri pencerahan, penjelasan, di kabupaten ini-ini, desa ini-ini, berita kita terakhir begini-begini, kondisi masyarakatnya sekian. Jadi ada dampaknya, ukuran kita, sebuah berita saya kira ada dampaknya, ada perubahan atau tidak. Kita rajin gencar memberitakan lalu orang menanggapi, setelah dia menanggapi, dia datang lalu responnya seperti apa. Itu yang selalu ada.

P : Apakah prinsip mengutamakan kepentingan publik menjadi patokan untuk memuat suatu berita? kaitannya dengan kasus gizi buruk?

N : Iya, itu prinsipnya. Yang kita bela itu adalah kepentingan publik. Pers kalau membela kepentingan tertentu, itu berarti dia akan mati. Pembacanya akan menghukum dia. Umpamanya koran-koran seperti koran politik, koran-koran agama, itu dia tidak bisa bertahan lama. Karena yang dia bela adalah pesan sponsor, kepentingan tertentu, golongan tertentu, politik tertentu. Jadi itu sudah akan langsung dikasi tau bahwa yang kayak-kayak begini tidak boleh diberitakan. Pos Kupang *no*, kita tidak berafiliasi dibawah golongan apapun, dibawah kepentingan apapun, dibawah instansi profesional. Kita adalah profesional. Kepentingan kita adalah, yang kita bela adalah kepentingan publik. Keberpihakan kita adalah keberpihakan kepada kepentingan umum, publik. Itu yang kita terjemahkan ke dalam rancangan berita, tampilan berita. Berita-berita *vulgar* juga tidak akan kita taruh fotonya. Foto umpamanya kapan hari yang bayi yang lahir tanpa tulang rawan di kepala itu, seperti film boneka itu kita kasih kabur. Di koran memang ada foto, tapi saya minta supaya dikasi kabur. Kenapa orang tidak suka juga yang begitukan. Melahirkan kengerian pada orang, itu tidak bae, tidak sehat. Jadi kita kabur, jadi profesionalisme itu sangat kita junjung, kepentingan publik itu kita junjung sangat tinggi. Itu tujuan kita ada, Pos Kupang ada.

Pos Kupang ada tidak membela kepentingan tertentu, apalagi agama tertentu. Pos Kupang sini PP nya itu orang Islam, Pemimpin Perusahaannya orang Islam, orang dari Jawa bukan orang dari sini. Dan kita tidak pernah bertanya kau agama apa, kau dari mana, oo ini agama ini, dari sini tidak boleh diterima. Kamu bisa bekerja dan membuktikan diri kau bisa mampu, diberi kepercayaan, diberi porsi kerjamu, diberi tanggung jawab lebih. Prinsipnya itu e.

P : Mengapa Pos Kupang sering menyajikan narasumber yang merupakan pemimpin suatu lembaga atau instansi?

N : Itu kalau terkait dengan kasus tertentu, lalu kita mesti mewawancarai orang-orang tertentu karena memang orang-orang seperti itu punya otoritas dalam memberi penjelasan. Kalau umpamanya banjir atau perang tanding di Alor, kita harus tanya Polisi, Kapolresnya. Karena orang-orang seperti itu adalah mereka yang punya otoritas dalam suatu kasus, kita tidak bisa hindarkan.

Jadi kalau umpamanya sekarang lagi ramai dengan tambang, kita tanya kepala dinas pertambangan. Karena dialah orangnya, orang bisa atau tidak. Kamu dia bapak tua itu, kepala dinas itu yang punya otoritas dalam memberi penjelasan masalah ini. Tidak bisa yang kita kalau masalah tambang, kita pergi tanya pastor paroki, kita pergi tanya ketua Gemit. Dia diluar otoritas dalam memberi penjelasan tentang tambang. Jadi mencari narasumber juga bukan masalah asal mencari. Omong tentang masalah gizi buruk, kita akan tanya dinas kesehatan, tanya dinas pertanian, bupatinya. Orang-orang ini yang sebetulnya mestinya punya otoritas memberi penjelasan tentang kasus gizi buruk, kita tidak bisa tanya kasus gizi buruk lalu kita tanya ke pendeta. Pendeta tidak ada urusan dengan itu, pendeta hanya punya urusan, pendeta hanya punya urusan dengan umat tentang bagaimana supaya umat masuk surga. Tapi urusan dengan gizi buruk bukan urusannya dengan pendeta. Salah besar kalau, salah keliru kalau kita omong gizi buruk lalu kita tanya pendeta. Dia bisa menjelaskan, tetapi dia tidak punya otoritas. Jadi narasumber itu selalu narasumber yang punya otoritas juga. Otoritas memberi penjelasan terhadap satu soal, itu narasumber

P : Terus kalau misalnya kasus gizi buruk di rumah sakit, kalau yang saya pantau yang diwawancarai itu kepala rumah sakit?

N : Kepala rumah sakit bisa memberi penjelasan tentang kondisi anak itu.

P : Kenapa bukan dokter yang menangani langsung?

N : Bisa juga dokter tapi kan yang lebih berwenang. Otorisasinya itu kan hampir selalu pasti kepalanya. Dokter bisa memberi penjelasan, tapi dia akan minta wartawan ini penjelasan dari kepala rumah sakit. Sangat boleh jadi penjelasan yang didapat wartawan adalah penjelasan si dokter. Tapi dokter minta ini penjelasan, kamu boleh kutip saya tapi tulis namanya kepala rumah sakit.

P : Apa ada alasan tertentu?

N : Alasan supaya apa otorisasi tadi e. Kita kalau di instansi-instansi kalau kamu masuk. Orang selalu menghindar, e tanya bos saja dulu, tanya kepalanya dulu. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Dia yang pucuk pimpinan terakhir, punya wewenang memberi penjelasan. Dia akan sangat tersinggung kalau yang beri penjelasan itu bawahan dia, staf dia. Nanti dia akan tanya, Kau beri penjelasan siapa yang suruh? Kau punya wewenang apa memberi penjelasan pada wartawan. Itu soal etika di birokrasi. Lain hal kalau itu orang *expert*, orang ahli, meskipun dia tidak dalam posisi sebagai kepala. Tapi karena dia sangat ahli, *expert*, dia punya mungkin studinya khusus tentang itu, tapi dia memberi penjelasan diluar posisi dia, status dia sebagai orang pemerintah. Jadi artinya media memosisikan dia sebagai seorang pemerintah tidak sebagai seorang *expert*, sebagai seorang ahli yang mengerti tentang gizi buruk. kepala dinas kesehatan. Ada seorang anak muda kuliah S3 dari Australia, nama Ermin Ndun, dia punya *thesis* adalah tentang nyamuk, Malaria. Kalau kita omong tentang malaria, kita musti tanya kepala dinasnya, karena apa, dia punya otoritas memberi penjelasan. Si Ermin ini staf kecil, staf tapi dia doktor loh. Beda halnya, kalau kita memosisikan dia sebagai seorang ahli, ilmuwan yang mengerti tentang malaria, karena dia studi khusus tentang itu. Silahkan memberi penjelasan, *news analysis* barangkali, silahkan.

Karena media memberi posisi dia tidak sebagai orang pemerintah. Tapi seorang ahli yang studi khusus tentang ini. beda kan? Juga seperti tadi juga rumah sakit juga sering-sering kamu bisa baca di berita, kepala IRD memberi penjelasan mewakili kepala Rumah Sakit. Pasti dia harus beri tahu kepada kepala rumah sakit bahwa pak tadi ada wartawan wawancara saya, saya beri penjelasan begini...begini...begini... Supaya dia juga tau, supaya besok namanya keluar di koran dia jangan kaget. Kita punya orang itu juga suka dihargai to, seperti juga mereka sangat tunjukan. Saya yang kepala kau beri penjelasan. Soal otorisasi.

P : Apakah narasumber Pos Kupang pada berita halaman utama hanya terbatas pada kaum intelektual atau aparat pemerintah?

N : Jadi, seperti yang saya bilang tadi. Jadi narasumber selalu kita cari itu orang-orang yang punya otoritas.

P : Yang di halaman utama?

N : Mau halaman utama atau semua halaman, selalu, itu prinsipnya. Biar dia halaman utama atau tidak tapi kalau memang dia itu punya otoritas memberi penjelasan terhadap satu soal yang kita tulis, iya.

P : Kalau orang awam kurang?

N : Orang awam dalam kaitan dengan apa?

Mungkin umpamanya lagi rame dengan sekarang kita angkat itu tambang, pertambangan, kita minta orang pertambangan omong, kepala dinas pertambangan, dosen-dosen di universitas yang jurusan pertambangan. Kalau tentang akibat dengan lingkungan, ya kita minta orang mengerti lingkungan, studi lingkungan yang omong. Macam profesor Jimmy Pello, dia akan omong tentang lingkungan, dampak tambang terhadap lingkungan, karena memang dia studi khusus tentang itu, dia dihargai di ilmuwan, ilmu dia itu. Karena artinya apa dia *expert* di bidang itu dan diakui, diterima publik sebagai orang yang mengerti lingkungan. Jadi tidak ada urusan dengan dia halaman berapa. Semua halaman kalau memang narasumber itu, kita selalu pada itu. Pada otoritas, orang yg punya otoritas.

P : Menurut anda, apakah agenda besar dari PK terkait pemberitaan gizi buruk di NTT?

N : Agenda dalam arti merancang sebuah liputan besar dalam gizi buruk tidak. Mungkin juga belum, artinya merancang khusus ke depan besar dalam gizi buruk tidak. Tapi hari demi hari, itu selalu menjadi perhatian kita.

Tanpa dirancang pun itu sudah menjadi perhatian pos Kupang. Kalau ada kasus gizi buruk ya diberi tempat, kita tetap memberitakan itu. Karena kita merasa bahwa itu terkait dengan kepentingan banyak orang, terkait dengan kepentingan publik, kebijakan anggaran, keberpihakan kepala daerah, kinerja para kepala instansi mereka seperti apa. Kita akan sangat terganggu kalau ada yang menderita gizi buruk sekian banyak orang gizi buruk.

Itu bisa merefleksikan banyak sekali hal disitu. Kinerja pemerintah, keberpihakan anggaran seperti apa. Mungkin anggarannya tidak ada, kalau anggaran tidak ada, DPRnya harus omong, kita musti evaluasi DPR kamu bikin apa saja, anggaran begini banyak, gizi buruk terjadi. Boleh beli laptop, boleh kredit mobil tapi orang gizi buruk untuk apa ada dewan.

- P : Bagaimana kebijakan Pos Kupang dalam pemilihan narasumber soal kasus gizi buruk? apakah ada rating tertentu?
- N : Narasumber yang kita pilih selalu pada orang yang seperti itu, lalu saya kira itu sudah e yang, Kalau gizi buruk pasti yang bicara adalah ahli gizi, bisa juga orang di kesehatan bagian gizi, kepala dinasnya, mungkin juga dekan fakultas kesehatan masyarakat dia bicara. Mengapa mereka? Karena mereka ini yang punya ahli, punya basic ilmu, punya dasar ilmu bisa memberi penjelasan, bisa memberi *way out* nya untuk mengatasi gizi buruk. Juga LSM-LSM yang berkecimpung disitu juga WVI, UNICEF, PLAN internasional. Mereka yang bergerak di bidang-bidang ini, bidang gizi buruk. Mereka kita beri tempat mereka bicara. Apa yang salah? Apa yang dilakukan pemerintah? Sebaiknya bagaimana? Mereka yang lebih mengerti tentang gizi buruk. Sehingga kita memilih narasumber, orang-orang seperti mereka.
- P : Bagaimana pelibat masyarakat (balita yang menderita gizi buruk), instansi kesehatan, serta pemerintah daerah diposisikan dalam berita kasus gizi buruk? apakah sebagai pihak yang dirugikan atau pihak yang bertanggung jawab atau bagaimana?
- N : Itu tadi. Mereka kita posisikan sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab lebih.
- P : Apa mungkin sebagai pihak yang dirugikan atau pihak yang bertanggung jawab?
- N : Mereka itu tadi, tanggung jawab pasti tanggung jawab semua kita. Mereka sebetulnya punya tanggung jawab lebih karena mereka berkecimpung di bidang itu e dibidang gizi buruk sehingga kita meminta mereka harus bisa berpendapat, bersuara dalam kasus gizi buruk. Bahwa itu mereka dirugikan dalam pemberitaan gizi buruk saya kira kita tidak bermaksud seperti itu. Media tidak boleh tidak bermaksud mengadili mereka itu, diposisikan sebagai terdakwa atau apa. Kamu salah kerjaan, bekerja belum maksimal, tidak, tapi kita menyoroti bahwa ini loh ada fakta, disini ada gizi buruk, kita wawancara mereka. Benar atau tidak. Tolong diberi penjelasan, apa yang sudah dilakukan, bagaimana mengatasinya. Mereka yang lebih tau kita memposisikan mereka sebetulnya sebagai orang yg punya tanggung jawab lebih dalam kasus gizi buruk. Kita tidak bisa, tidak seenaknya memperlakukan, menempatkan mereka mereka sebagai orang yang salah. Media tidak boleh sampai menuduh-nuduh orang salah dalam memberitakan dia. Silahkan masyarakat pembaca yang menilai sendiri, yang sebetulnya salah dalam gizi buruk ini siapa? Dinas kesehatannya kah? Kepalanya kah? Kepala Puskesmas kah? Dokter kah? Atau ibu rumah tangga kah? Ibu PKK kah? Dan kalau menghakimi ya silahkan masyarakat yang menghakimi sendiri, jangan itu dari media.
- Tugas kita adalah membeberkan fakta, faktanya sekian. 5 orang di desa di Oebelo umpamanya atau mati karena gizi buruk, 20 karena Marasmus, kekurangan zat-zat ini...ini...ini...Kita beberkan lalu minta penjelasan dari dinas kesehatan, pak Bupatinya, kepala puskesmas disana, lurahnya, camatnya, kenapa terjadi ini, di Tarus umpamanya, Kok ada sawah kenapa mereka gizi buruk, semua sayur dari Tarus kenapa mereka gizi buruk, apa

yang salah? Kita tidak sampai pada menuduh, tapi biar masyarakat yang menilai, kita tunjuk ini di Tarus ini potensinya begini...begini...begini... masyarakat yang menilai, kalau begitu yang salah adalah. Kalau begitu yang salah adalah lurahnya, camatnya, bupatinya, yang tidak bisa mengajak masyarakatnya tanam ini, tanam itu, tanam ini, tanam ini. Supaya masyarakatnya tidak sampai gizi buruk. Jadi kita tidak menempatkan mereka sebagai terdakwa, tapi selalu kita tempatkan mereka. Saya punya istilah tadi, orang yang punya tanggung jawab lebih dalam kasus ini.

P : Menurut Pos Kupang bagaimana posisi pemerintah daerah serta instansi kesehatan dalam kasus gizi buruk?

N : Mereka itu sebetulnya ujung tombak. Instansi kesehatan, mereka ujung tombaknya. Tapi seperti saya singgung dari awal tadi. Musti dibedakan, instansi kesehatan selalu bilang bahwa mereka bekerja setelah ada kasus. Sebelum ada kasus itu bukan pekerjaan mereka. Kalau sudah gizi buruk itu post waktu, jadi kalau sudah terjadi itu urusannya dinas kesehatan to. Mereka yang akan terlibat disitu lebih jauh, lebih banyak porsinya mereka, mengatasinya bagaimana, mendrop obat, mungkin juga susu, kacang hijau. Tapi dalam kasus gizi buruk itu kita tidak bisa mengatakan bahwa instansi ini saja yang bertanggung jawab, tidak. Banyak sekali elemen, banyak sekali instansi yang terlibat didalamnya. Karena itu saya bilang apa, musti ada sinergisitas antara *stake holder* di birokrasi supaya menangani gizi buruk, gebuk ya gebuk sama-sama. Kalau mau mengatasi tidak bisa tunggu di dinas kesehatan, itu dia hanya liat di rumah sakit berapa yang gizi buruk, oh sudah ada yang gizi buruk. Sebelum ini ni, mereka masuk rumah sakit, itu mereka ada dimana? itu tanggung jawab siapa? PKK barangkali, dinas mana lagi yang pendidikan atau apa, ibu PKK atau mana yang pertanian perkebunan, memberi kampanye pada masyarakat supaya hidup sehat tu begini makan satu hari sekian kali, asupan gizi yang sehat itu ini. Ini mungkin bukan tanggung jawab bukan dinas kesehatan, mereka hanya tunggu setelah mereka masuk rumah sakit. Karena itu mengatasi masalah gizi buruk adalah pekerjaan *stake holder* bukan hanya instansi kesehatan saja. Mereka hanya kelihatan setelah ada kasus. Kalau sudah ada kejadian gizi buruk ujung tombak mengatasinya, saya kira itu mereka.

P : Seberapa besar peran mereka dalam kasus ini? bisa dijelaskan sedikit?

N : Instansi kesehatan, perannya. Mereka ini kan sudah berperan setelah ada kasus. Mestinya itu pemerintah masing-masing kabupaten, dengan otonomi daerah itu kan, semua urusan itu kan kebanyakan sudah pada tingkat daerah di masing-masing kabupaten. Sejauh yang saya lihat itu adalah pemerintah sudah mulai berperan, meskipun belum maksimal. Kondisi lokal setiap daerah juga beda. Macam, tipe-tipe rumah sakit juga ada yang kelas D, C sehingga masih sangat terbatas sehingga mengharapkan Dinas kesehatan berperan maksimal sekali untuk mengatasi gizi buruk, saya kira belum bisa. Tapi bahwa mereka sudah berperan iya. Mereka sudah berperan iya. Harapan kita adalah supaya gizi buruk ini kan bukan lagi isu baru, kejadian baru, jadi ini sudah berulang tahun e. Mestinya pemerintah dibawah koordinasi yang lebih baik adalah supaya selalu melakukan langkah antisipasi. Kalau umpamanya

mestinya belajar dari pengalaman lah, pembaca gizi buruk itu terjadi setiap tahun. Bupati, Dinas Kesehatan mau bikin apa supaya menghindarinya, mereka bisa melakukan survei, gizi buruk itu terjadi kira-kira bulan apa? Pace kelik terjadi di bulan apa? Kalau ada sinergisitas, berarti Bulognya juga masuk, bencana alamnya juga masuk, dinas kesehatan juga masuk, PKK juga masuk supaya kampanye bersama mengatasi ini, sehingga tidak terjadi. Jangan dia terjadi dulu baru mempersalahkan dinas kesehatan, kamu bikin apa? Kami ini hanya merawat mereka yang sudah sakit. Mereka sebelum sakit ini siapa yang bikin, ini siapa punya urusan, bukan kami punya urusan. Jadi menurut saya, kedepan yang harus diperhatikan lagi, merancang sebuah desain aksi supaya itu dan itu melibatkan *stake holder* di setiap kabupaten, dinas Kesehatan, ibu-ibu PKK, dinas mana lagi, puskesmas, kecamatan, lurah, selalu terus berkoordinasi supaya melakukan kampanye, supaya masyarakat itu tau, bulan sekian itu, rawan pangan terjadi pada bulan sekian. Mengantisipasi bagaimana. Mungkin beras raskin di drop pada menjelang bulan-bulan menjelang itu. Lalu kalau mereka ada panen, ini disimpan supaya bulan ini ada ini. Kalau bulan sekian ini terjadi pace kelik, makanan alternatifnya apa, supaya lumbung itu selalu penuh dan asap dapur selalu mengepul. Jangan tunggu kasus dulu baru menyalahkan dinas kesehatan, sudah terlambat. Jadi maksud saya adalah langkah antisipasi itu yang paling penting.

P : Bagaimana Pos Kupang memposisikan diri dalam kasus ini?

N : Selalu menjadikan gizi buruk itu isu-isu penting yang menjadi liputan kita, selalu menjadi perhatian. Pos Kupang juga saya kira banyak sekali instansi, dinas kesehatan, pemerintah juga mestinya bersyukur dan berterima kasih pada Pos Kupang karena selalu memberi tempat pada berita-berita gizi buruk, kurang gizi, kelaparan. Jadi kita selalu memberi tempat, kita akan ngotot sekali, akan habis-habisan, menulis juga dengan begitu banyak *angle* sampai juga menggelar diskusi disini untuk mengatasi, bagaimana mengatasi gizi buruk.

P : Diskusi tentang apa ya?

N : Tahun lalu kita pernah melakukan menggelar diskusi ni dengan dinas Kesehatan teman-teman dari LSM. Tentang revolusi KIA. Jadi kesehatan ibu dan anak, terkait dengan gizi buruk. Itu kita gelar diskusinya. Jadi polanya adalah pemberitaan kita adalah *straight news*, kalau itu beritanya kuat, belum ada dampak penanganannya kita naikan pendekatan berita menjadi *indeepth news*. Kita gencar lagi, gencar lagi. Kalau belum juga mempan minta orang menulis opini tentang gizi buruk. Jadi tahapan, lapisan-lapisan berita yang isu berita yang bisa dimainkan oleh media yaitu *straight news*, *indeepth news*, opini. Juga maksudnya apa supaya semakin gencar diberitakan, semakin membangkitkan kepedulian, perhatian para pihak, *stake holder* itu supaya segera beraksi, segera bertindak, ini loh kita sudah habis-habisan ini pak Bupati bikin apa? Jangan kita beritakan gizi buruk, wartawannya dibilang sembarangan, berlebih-lebihan seperti di lembata to. Ini, itu berlebih-lebihan, berita itu besar-besaran, memang gizi buruk, orang di Ille Ape sudah makan buah bakau, sampai tingkat nasional, di TV turun, Kompas turun. Kalau

dibilang kita itu berlebihan, pak musti mengaca diri to. Jadi kita akan gencar memberitakan gizi buruk.

P : Bagaimana implementasi kebijakan redaksional/politik SKH Pos Kupang dalam memberitakan peristiwa ini?

N : Jadi isu itu sebagai sebuah fakta sosial. Itu kita rancang dia, kita terjemahkan, kita implementasikan dengan beri penugasan pada wartawan. Kita beri bekal dia gini...gini...gini.... Dia yang pergi ke lapangan, membikin berita, jadi kita, isu itu, fakta itu, gizi buruk itu, kita minta, dan kita olah, jadi mentransformasikan dia menjadi bahasa berita. Kalau kita tidak mentransformasikan dia dari fakta menjadi bahasa berita orang tidak tau kan. Jadi kita dengar ada isu, menugaskan pada wartawan, dia mendapat berita ke lapangan menulis berita itu, proses ini yang kita mentransformasikan fakta menjadi bahasa berita. Itulah tugas yang paling mulia, tugas yang paling penting dari media. Fakta sosialnya begini, fenomenanya seperti ini coba ditransformasikan menjadi bahasa berita ke dalam berita. Itu yang saya kira kamu maksudkan.

P : Bagaimana pandangan SKH Pos Kupang (sebagai media massa) mengenai kasus gizi buruk di Nusa Tenggara Timur?

N : Saya kira kita musti jujur bahwa sejauh ini di NTT, hanya Pos Kupang sepertinya hanya Pos Kupang yang lebih ngotot, lebih gencar, dan lebih punya peduli terhadap masalah gizi buruk. Media lain saya lihat itu lebih mengasyikan diri dengan fungsi hiburan. Memberi porsi kepada gizi buruk jarang sekali, toh kalau mereka sampai menulisnya itu artinya hanya *follow up* dari berita-berita yang sudah diangkat Pos Kupang. Baik atau tidak Pos Kupang selalu menjadi rujukan para pihak lain di luar ini, terkait dengan gizi buruk banyak sekali yang bertanya kesini tentang gizi buruk. Ketika media-media lain yang menyentuh itu artinya Pos Kupang sudah lewat, kita tidak pernah merasakan kecolongan atau apa tapi kami sudah lewat, sekarang baru kamu raba, kamu lain sentuh, tapi kita sudah melewati itu e.

P : Mengapa berita mengenai pernyataan rumah sakit akan merawat balita gizi buruk (PK, 15 September 2008) dan pernyataan walikota Kupang untuk menanggung biaya pasien gizi buruk (PK, 25 September 2008) bisa menempati halaman utama pada bulan September 2008?

N : Rumah sakit mana?

P : Di Maumere, Rumah Sakit Umum Daerah Maumere?

N : Berita itu menjadi berita utama, saya kira itu tidak terkait dengan bulannya. Tapi itu kasus dan kita melihat bahwa ukuran dia sampai pada halaman depan itu kan ada syarat-syarat berita itu, kuat atau tidak, relevansinya kaya apa, syarat-syarat berita saya kira kamu bisa mengerti to. Jadi kita ukur, Oo ini gizi buruk, sekian banyak orang di Maumere. Kita merasa bahwa berita ini penting, berita ini mungkin tidak menarik tapi dia penting. Orang tidak suka lihat orang kurus-kurus kan di koran. Tapi kita sampai menempatkan berita itu, kepentingan kita adalah ini penting, kalau kita tidak memberitakan sampai halaman depan. Pak bupatinya mungkin juga tidak terlalu menaruh perhatian, mungkin juga dia tidak tau, kalau dia tidak tau mungkin dia tidak melakukan tindakan intervensi untuk mengatasi ini, itu kan makanya kita

memberi tempat. Jadi *agenda setting* media itu adalah selalu melecut perhatian orang, terutama mereka yang berkuasa ini. Supaya melakukan sesuatu, supaya ada perubahan terjadi. Dalam gizi buruk umpamanya di Maumere tadi. Kenapa maumere sampai ke depan, berita itu kita anggap penting. Penting sekali, karena ada orang sampai gizi buruk, mungkin juga tidak banyak, tapi bahwa ada loh.

Karena itu pak Bupati kita memberitakan ke depan bahwa pak Bupati tolong to, kita tidak perlu menuliskan tolong, tapi pak Bupati dengan baca berita itu, harapan kita adalah dia beraksi, dengan dia kumpul dia punya ini, supaya segera melakukan intervensi, mengatasi itu. Lalu itu juga di kota Kupang itu Walikota bilang menanggung biaya pasien gizi buruk.

Saya kira itu juga jalan keluar yang menarik, jalan keluar Walikota yang menarik. Jadi pasien gizi buruk itu ditanggung pemerintah. Kalau tidak ditanggung pemerintah, dia sudah gizi buruk berarti bahwa dia sudah tidak bisa beli makanan kan, kalau dia tidak bisa membeli makanan dia tidak akan pergi ke rumah sakit. Hanya urus makan saja tidak bisa, bagaimana membeli obat. Jadi ketika itu diangkat oleh Pos Kupang, mungkin, pasti sebelum-sebelumnya sudah mulai diangkat, sehingga Walikota merasa bahwa saya punya warga ini di kota Kupang ada yang gizi buruk. Saya membantu apa, oh kalau begitu pemerintah membantu dengan biaya rumah sakit. Itu saya kira itu menarik. Hal baru yang mau ditonjolkan Pos Kupang bahwa di kota Kupang, pasien gizi buruk Walikotanya menanganinya, kalian lain di kabupaten-kabupaten lain seperti apa. Bisa contoh walikota kupang, itu yang kami tonjolkan, bisa menjadi contoh untuk Bupati yang lain. Di kota Kupang Walikotanya menanggung loh, kamu disini seperti apa, dibiarkan mati sendiri di rumahnya atau bagaimana. Itu efek lain yang mau kita kasi tau kepada para bupati lain kan sebetulnya. Ini loh, Walikota menanggung pasien gizi buruk di kota Kupang, perawatannya, kasih susu lagi barangkali. Kamu bikin apa di Maumere itu, di Larantuka kamu bikin apa dengan pasien gizi buruk, kamu kunjung tidak.

P : Profile seperti apa yang ingin digambarkan Pos Kupang dalam menyosokan ketiga pelibat wacana (balita penderita gizi buruk, pemerintah daerah, serta instansi kesehatan)?

N : Profil maksudnya?

P : Kira-kira mau gambarkan seperti apa kalau dalam pemberitaan Pos Kupang?

N : Profil mereka kah. Balita gizi buruk saya kira kita selalu memberi tempat pada mereka dengan harapan bahwa ada orang yang prihatin, ada orang yang peduli. Mereka ini kan sebetulnya, anak-anak ini kan korban, dia sampai begitu kan bukan atas keinginan dia, tapi karena ada suatu situasi yang menyebabkan dia menjadi seperti itu. Sehingga kita selalu memosisikan mereka itu sebagai korban dengan harapan membangkitkan simpati, empati orang untuk membantu. Saya kira dampaknya dengan walikota tadi sudah bisa. Jadi, dengan kita menonjolkan orang, korbannya, juga dengan orang tuanya itu mengkondisikan orang tuanya punya keadaan ekonominya. Harapan kita bahwa ada orang yang bersimpati terjadi, walikota siap menanganinya.

Lalu yang kedua tadi apa?

P : Pemerintah daerah?

N : Pemerintah daerah, sebetulnya dengan kita sering memberitakan kasus gizi buruk adalah itu kita mengevaluasi, kita mau mengevaluasi. Sudah sejauh mana kamu lakukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan kesehatan masyarakat. Dana begitu banyak dari setiap tahun digulirkan, skema anggaran seperti apa. Untuk kepentingan pembiayaan kesehatan, jamkesmas itu kayak apa. Di NTT ini kan kasarnya orang sehat dilarang sakit o, kenapa? Dia takut sakit, karena kalau dia sakit, berarti tidak ada orang biaya. Sampai di rumah sakit juga dia masih diperlakukan secara diskriminatif, iya kan? Apalagi datang dengan sirih pinang, dengan kain, orang timor. Itu pasti mereka akan tidak diperhatikan, tidak dihiraukan. Itu yang juga mau memberitahukan kepada pemerintah, kalian ini ada untuk semua orang. Jadi kita bisa mengevaluasi mereka, dalam kaitannya dengan gizi buruk, dengan semakin banyak memberitakan kita mengevaluasi mereka. Ini loh kinerja dinas kesehatan sekian, ini loh kamu punya dinas Pertanian yang bilang mau tanam ini, tanam ini, hasilnya ini. PPL yang bilang setiap tahun sekian banyak orang ke desa-desa ini hasilnya. Jadi pemerintah daerah sebetulnya dalam posisi kita evaluasi. Jadi dengan banyaknya gizi buruk, pemerintah seharusnya bisa mengintrospeksi diri, saya ini sudah melakukan sesuatu atau belum terhadap, terkait dengan kesehatan masyarakat. Kalau masyarakat saya ini tiap tahun gizi buruknya meningkat, kematian ibu makin tinggi, kematian ibu melahirkan makin tinggi. Saya ini sudah bekerja atau belum, kalau makin tinggi, saya ada itu penting atau tidak. Itu yang kita selalu secara tidak langsung kita mengevaluasi mereka, ini hasilnya, kita mengevaluasi mereka dengan cara apa, membeberkan fakta...fakta...fakta. Gizi buruk desa ini, kurang disini, gagal panen disini, hama menyerang disini, hama serang tiap tahun, dinas ini Pertanian bikin apa? PPL kamu bikin apa? Gagal panen disini, kamu bikin apa? Kamu ada kamu bikin apa? Jadi mereka dalam posisi, kita akan gencar sekali dengan hal-hal seperti itu.

P : Kalau instansi kesehatan?

N : Instansi kesehatan sama, instansi kesehatan juga sama. Mereka ini sudah bikin apa? Dengan semakin membeberkan ini, kamu sudah bisa mengevaluasi. Jamkesmas sudah jalan dengan baik atau belum, stok obat di rumah sakit sudah aman atau belum, dokter ini di rumah sakit ini sudah ada atau belum, tenaga-tenaga medis yang khusus untuk gizi sudah ada atau tidak. Jujur ade e, di NTT ini tenaga gizi buruk susah sekali, yang ahli gizi, tenaga kesehatan yang khusus belajar tentang gizi, itu jarang sekali, belum sampai 20 orang di NTT ini, idealnya tiap rumah sakit itu ada satu. idealnya, kenapa? Dia itu bertanggung jawab memberi pengetahuan pada masyarakat. Anak itu umur sekian dia makan sekian, dia butuh asupan gini...gini...gini... Di NTT tidak, malah seingat di Ende itu cuma ada satu. Kita belum tau di kabupaten lain ini. Kalau itu kita evaluasi menjadi berita yang sangat luar biasa. Ternyata NTT kekurangan umpamanya 900 ahli gizi. Itu berhak di sekolahkan, tidak bisa bidan umum, itu memang spesialisasi dia adalah gizi, dan itu idealnya adalah setiap puskesmas ada satu. Kondisi NTT seperti apa,

dinas kesehatan harus bisa mengukur diri, saya sudah bekerja atau belum. Kalau gizi buruk terus, tiap tahun gizi buruk, kepala dinas Kesehatan dengan Bupati, dia harus memikirkan. Kira-kira saya musti menyekolahkan berapa banyak orang ahli gizi yang dia kembali ke Puskesmas, ke desa-desa, terjun pada masyarakat. Dia memberi petunjuk pada masyarakat cara masaknya begini, ikan masak begini, cuci beras itu begini. Itu pengetahuan-pengetahuan praktis yang memang tertuju pada masyarakat. Mereka tidak tau, mereka kenyang, kenyang tapi dalam porsi nasi satu piring macam gunung Fatuleu ini gizi nya seperti apa, kandungan gizinya bagaimana, kan terukur tho, mereka mengerti. Ahli gizi itu porsinya ahli gizi. Saya kira dinas kesehatan dengan kasus itu, dia musti merefleksi diri. Saya ini sudah bekerja maksimal atau belum, rancang program kerja saya ke depan itu, kira-kira modelnya seperti apa?

Rutinitas redaksional Pos Kupang

P : Bagaimana mekanisme rapat redaksi dan kebijakan redaksional?

N : Rapat redaksi kita sini ada 3 kali, harian. Rapat jam 8 pagi itu rapat namanya rapat perencanaan berita. Rapat itu dihadiri oleh Redpel, para redaktur dan para reporter. Rapat itu, forum rapat itu menugaskan, merancang berita, liputan untuk besok, edisi besok. Itu biasanya hanya untuk halaman satu, halaman dalam itu urusan di desk masing-masing. Mereka yang rapat intern mereka, reporter dengan redaktur. Rapat format pagi itu rapat proyeksi halaman satu, rapat proyeksi.

Trus nanti rapat siang itu jam 5, rapat sore rapat *budgeting* itu dihadiri oleh dewan redaksi, para redaktur itu mengevaluasi, melihat apa yang sudah dirancang tadi pagi, sudah lengkap atau belum, *cover both side* atau belum, narasumbernya pas atau tidak. Fotonya apa, analisisnya siapa, itu kita rapat sore.

Setelah itu kita rapat jam 8 malam, itu sudah rapat menyangkut *lay out*, perwajahan. Itu sudah jauh lebih teknis, sudah malam jadi dengan orang dari *layouter*. Itu khusus untuk halaman satu. Itu dia akan merancang, berita besok itu kita dapat itu ini...ini...ini...iklannya sekian. *Lay out* bilang eh rancang, desainer bilang ini musti hanya ada enam berita, foto saya minta ada posisi begini, foto tinggi, foto lebar, foto satu close up satu disini. Jadi tiga kali rapat.

P : Siapa yang memimpin rapat redaksi?

N : Rapat pagi dipimpin oleh redaktur, eh Redpel, tapi dia dibantu oleh piket, Redaktornya.

Rapat sore itu, piketnya yang memimpin rapat, pagi juga dia yang memimpin rapat, tapi dibawah redpel. Juga rapat malam piket itu yang memimpin jadi rapat pagi, rapat sore, rapat malam.

P : Jadi, pemimpin redaksi tidak memimpin rapat?

N : Tidak. Kita yang lain hadir.

P : Apakah semua wartawan diwajibkan datang?

N : Wajib, pagi, mereka punya, wartawan hanya untuk rapat pagi. Nanti juga mereka rapat dengan mereka punya desk masing-masing, dengan dia punya

redaktur. Ada desk kota dengan redaktur kota, desk ekbis dengan redaktur ekbis.

P : Sejauh mana keterlibatan wartawan dalam rapat redaksi?

N : Rapat pagi, mereka musti pro aktif e. Jadi rapat pagi sebetulnya kan, kita *sharing*, kita diskusi. Itu sangat demokratis to. Kita mau rencana kembangkan berita begini...begini...begini... pendapat wartawan bagaimana? Dia menganjurkan apa? Ooo saya dengar ini su begini...begini...begini... O tapi bulan lalu harga mangan sekian, ini-ini, begini-begini. Jadi itu semua terlibat aktif, beri pendapatnya, menyumbangkan gagasannya, beri tahu isu baru apa.

P : Bagaimana suasana rapatnya?

N : Sangat demokratis, sangat demokratis. Dan saya kira rapat yang paling demokratis itu hanya ada di media-media dengan juga di partai ya, beda dengan rapat di pemerintah, kalau ada kepala dinasnya kan semua iya bapa, iya bapa, iya bapa. Disini tidak, langsung. Itu kita sangat demokratis

P : Trus kalau rekrutmen jurnalis Pos Kupang? Seperti apa?

N : Rekrutmen, kita rekrut wartawan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ada yang minta berhenti, pindah tempat lain, atau kita merasa melihat ada kekurangan, kita akan merekrut. Periodenya itu tidak tentu, bisa lima tahun, bisa dua tahun, bisa sepuluh tahun, jadi seperti itu. Lalu kita tes, seleksi mereka, dari semua disiplin ilmu kita terima, sekurang-kurangnya S1. Dari semua disiplin ilmu kita tes, kita setelah lulus wawancara mereka. Tes habis, melatih, *training* kurang lebih dua minggu paling cepat, dua minggu lebih sedikit, setelah itu mulai bekerja.

P : Bagaimana penentuan sebuah berita masuk ke halaman apa? Siapa yang menentukan rubrikasi hingga pemilihan headline di Pos Kupang?

N : Jadi semua koran itu ada penjaga halamannya, yang bertanggung jawabnya itu yang redaktur tadi. Masing-masing redaktur dia di, ada halamannya. Redaktur Ekbis dia punya halaman berapa, berapa, daerah berapa, berapa.. Dia yang bertanggung jawab untuk isi halamannya.

P : Trus kalau headline?

N : Headline di halaman?

P : Halaman utama?

N : *Headline* di halaman depan itu kita rapat forum

Jadi pagi itu kita proyeksi ini besok ini *headlinenya*, sore ini masih kuat *headline* masih, malam kalau ada perubahan dia bisa geser lagi, ada isu lagi. Jadi selalu bisa berubah-ubah.

P : Bagaimana sistem distribusi SKH Pos Kupang? distribusi koran Pos Kupang?

N : Seluruh NTT, minus sabu yang belum karena masih susah. Tapi seluruh NTT kita ada sirkulasi, masuk semua.

P : Bagaimana cara penentuan judul dan sub judul dalam SKH Pos Kupang? Apa saja pertimbangannya? Apakah merupakan otoritas wartawan atau merupakan keputusan redaksi?

N : Jadi, alur sebuah berita itu dari wartawan, dia naik ke redaktornya, redaktornya ke editor. Jadi bisa terjadi tiga perubahan judul, juga bisa terjadi tiga perubahan *angle*, bisa juga terjadi tiga kali perubahan *lead*. *Lead* di wartawan ini, dia mengangkat *lead* ini, tau to *Lead*? nanti di redaktur *leadnya*

ini, judulnya ini, mungkin di editornya lain lagi. Dari editor sesudah itu ke produksi, manajer produksi, orang yang bertugas paling akhir, bertanggung jawab penuh untuk seluruh isi halaman. Dia yang menentukan, dia bilang berita ini cabut, cabut. Berita ini belum *cover both side*, ini tidak seimbang, cabut. Itu otoritas itu ada pada manejer produksi.

P : Pertimbangannya apa itu?

N : Pertimbangan moral, pertimbangan kode etik. Jadi dia sudah pada pertimbangannya itu. Kelengkapan berita itu masih di reporter, di redaktur. Tapi kalau sudah sampai di meja produksi itu sudah moral, etika, kode etik, sara. Berita ini tidak usah, sebaiknya penting tapi sebaiknya tidak perlu turun. Nanti umpamanya orang protestan di Nun Baun Sabu serang mesjid di Namosain. Menarik tapi manejer produksi bilang tidak penting nanti tambah runyam, tambah *chaos*. Cabut, dia punya otoritas.

P : Bagaimana penentuan lead dan paragraf penutup dalam pemberitaan di SKH Pos Kupang?

N : Itu jadi tahapan jadi dari reporter duluan, setelah itu dia punya berita itu lari ke redaktornya, dari redaktornya ke editor baru ke produksi.

P : Dalam memilih foto/gambar/tabel apa saja yang menjadi pertimbangan? Apa ada alasan tertentu untuk menonjolkan sesuatu?

N : Itu foto biasanya mengikuti berita. Jadi kalau umpamanya tabel, itu kan yang mendukung berita, memperkuat, menjadi indah, jadi visualisasi tabel. Tapi selalu dengan mendukung berita yang mau diberi tabel itu apa, jadi selalu mendukung. Foto selalu mengikuti berita, meskipun prinsipnya tidak harus foto. Foto juga berita. Jadi sebuah foto tidak mesti mengikuti berita. Tapi kalau ketika sebuah berita itu umpamanya dia meminta foto, maka biasanya dan sebaiknya foto yang terkait atau mendukung berita itu. Sehingga kalau berita itu umpamanya seminar tentang gizi buruk, ya foto tidak bisa foto pacuan kuda to karena tidak ada urusan, tidak ada kaitan gizi buruk dengan pacuan kuda. Jadi mengikuti dia, mendukung. Juga dengan tabel-tabel.

P : Apa ada alasan tertentu untuk menonjolkan sesuatu? dari foto dan tabel itu?

N : Kita pertimbangannya itu selalu dari aspek jurnalistik. Umpamanya kita mengangkat, menentukan ini menjadi headline, itu pertimbangannya tadi to, kuatnya tidak, relevansinya. Jadi selalu dengan pertimbangan jurnalistik. Lalu foto, selain itu juga mendukung berita, juga menjadi unsur pemanis *lay out*, memperindah wajah koran, juga dengan tabel-tabel tadi. Kita minta ini, berita ini tidak ada fotonya, tapi akan lebih indah kalau ada tabel, kalau tidak ada tabel ya mungkin dibikin *lay out*, *pull out* sedikit. *Pull out*, jadi kutipan, *quotation*, kita ambil *pull out* supaya dia jadi lebih indah. Kalau tidak kita pasang foto *close up* orang siapa, lalu *statement* dia satu kalimat. Itu juga estetikanya, jadi ada pertimbangan estetikanya.

P : Apakah wartawan yang meliput mengenai permasalahan ini ditunjuk langsung oleh redaktur atau ada aturan lain? Apakah ada pertimbangan tertentu dalam memilih wartawan yang meliput kasus ini?

N : Kalau wartawan di daerah dia harus bertindak sendiri to. Kalau kasusnya terjadi di daerah ya dia kan, wartawan daerah itu wartawan *all round* to. Jadi kita menugaskan dari sini, memberi point-pointnya, *assignment*, penugasan

dari sini. Ini Lembata ini gizi buruk ya, umpamanya. Kamu kita tugaskan dari sini setelah rapat pagi, kembangkan berita gizi buruk di Lembata. Nanti kita minta wartawannya kau hubungi ini, hubungi ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu masyarakat, fotonya ini. Kita tugaskan dari sini. Juga wartawan juga bisa berkreasi sendiri kan. Kalau disini, kita kompromi sini, kita menugaskan dalam rapat pagi, gizi buruk, wei kau ya, kau lebih dekat dengan orang ini. Deskmu ini, kau sesuai dengan kau punya desk ini, kau punya liputan ini, kau punya desknya, kau punya bidang ini. Nanti kita yang menugaskan dia.

P : Apa yang sebenarnya ingin dicapai Pos Kupang dengan pemberitaan mengenai kasus gizi buruk di NTT?

N : Kita berharap, harapan kita, obsesi kita, mimpi kita adalah gizi buruk tidak ada lagi di bumi NTT. Karena itu, kita gencar sekali bukan hanya supaya orang lain terganggu, meskipun kita juga memang kita masih mau mengganggu dia. Jangan tidur terlalu nyenyak, pak Bupati jangan tidur terlalu nyenyak ada gizi buruk disini. PAD, *income* perkapita masyarakatmu sekian, kalau mereka masih sekian, mereka tidak bisa beli telur untuk anak mereka, kalau tidak bisa beli telur, mungkin pemerintah bisa bikin apa, mungkin adakan ayam atau apa. Kalau ada ayam, potong ya jangan tulangnya kasih anak, isinya kasih bapak. Jadi kita beri penjelasan supaya apa, supaya terjadi perubahan pola hidup, terjadi perubahan perilaku, dan juga terjadi perubahan taraf hidup yang makin lebih baik. Itu goal, itu mimpi, itu harapan, itu obsesi dari setiap media. Perubahan, media itu, koran itu diadakan, terbit. Intinya paling penting adalah supaya terjadi perubahan.

BIODATA SUBYEK PENELITIAN

1. Nama Lengkap : Tony Kleden
2. Jabatan/Pekerjaan : Manejer Redaksi dan Produksi
3. TTL : Larantuka, 4 Februari 1967
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Katolik
6. Kota Asal : Larantuka
7. Suku : Flores
8. Alamat Rumah : Jl. Libra, Liliba, kota Kupang
9. No Telp/Email : 081339410920/ tony_kleden@yahoo.com
10. Status Perkawinan : Menikah
11. Jumlah Anak : Dua
12. Masuk PK sejak : 1996
13. Sejarah Pendidikan :
 - TK : Larantuka
 - SD : Larantuka
 - SLTP : Larantuka
 - SMU : Seminari San Dominggo Hokeng, Larantuka
 - Perguruan Tinggi : STFK Ledalero, Maumere
14. Sejarah Pekerjaan :
 - Tahun Pekerjaan : - 1992-1993, Wartawan SKM Dian, Ende.
 - 1996- sekarang, Wartawan Pos Kupang.
15. Pengalaman Organisasi : - Anggota PWI
16. Aktivitas diluar Pekerjaan : -

TRANSKRIP WAWANCARA

P = Peneliti

N = Narasumber

Redaktur

P : Apa saja tugas redaktur?

N : Tugas redaktur itu membuat perencanaan liputan, lalu menugaskan reporter untuk menggarap rencana liputan itu di lapangan, lalu mengecek kembali hasil liputan kemudian mengedit berita-berita yang ditulis oleh reporter. Itu mengecek, dalam mengedit itu mengecek segala macam kelengkapan yang terkait dengan rambu-rambu jurnalistiknya.

P : Sejauh ini, bagaimana kontrol redaktur dalam proses produksi berita? bisa dijelaskan singkat?

N : Kontrol redaktur itu yang pertama ketika reporter berada di lapangan redaktur itu mengontrolnya melalui alat teknologi komunikasi yang disiapkan, rata-rata ya via sms atau telpon ke *handphone*. Kemudian, ketika beritanya sudah di input masuk ke dalam perangkat kerja kita, itu kita mengecek lagi kelengkapannya. Kalau ada yang belum lengkap kita minta supaya reporter itu untuk melengkapi kekurangannya itu. Itu fungsi kontrol kita terhadap proses produksinya. Kalau itu sudah lengkap semua kita tinggal mengedit lalu mengecek lagi segala macam hal yang ada di dalam berita itu. Kalau sudah lengkap ya sudah, kita redaktur mengover ke ruang yang disiapkan untuk redaktur lalu nanti itu trus selanjutnya itu ditangani produksi

P : Posisi om disini?

N : Saya sebagai redaktur politik dan keamanan. Polkam. Juga redaktur pelaksana.

P : Bagaimana pendapat anda pribadi mengenai kasus gizi buruk di NTT?

N : Kasus gizi buruk ini saya berbicara dari kacamata pemberitaan media ya, saya tidak hafal persis kalau angka secara keseluruhan, secara statistik.

P : Tidak, maksud saya kalau dari pendapat om pribadi sendiri?

N : Oh ya, itu tu saya melihat dari berita-berita yang disuplai oleh teman-teman baik yang bertugas di markas Pos Kupang maupun dari daerah-daerah. Itu rata-rata seluruh wilayah NTT tu ada kasus gizi buruknya. Lalu penanganannya hanya sebatas memberikan makanan tambahan yang bersifat lebih banyak itu *emergency news* saja. Tapi untuk penanganan lanjutan bagaimana merubah anak-anak gizi buruk itu supaya bertumbuh sehat lalu ke depan itu dorang punya sumber dayanya juga bertumbuh menjadi lebih baik itu belum. Gizi buruk itu lebih banyak disebabkan pola makan. Jadi, gizi buruk di NTT itu tidak semata-mata hanya karena kemiskinan tidak, tapi ada yang gizi buruk ditimbulkan karena pola makan. Cara mengasuh anak oleh orang tua lebih cenderung memberikan makanan-makanan *instant* ketimbang makanan-makanan yang memang punya nilai gizi. Itu karena dari kebiasaan hidup. Ada yang orang tua yang memang begitu anaknya sudah mulai mencoba makan itu, sudah diperkenalkan dengan makanan-makanan *instant*

yang ada di toko. Akhirnya kan dalam perjalanan itu anak sudah mulai, anak tidak biasa dengan makanan-makanan alam yang punya nilai gizi, ini susah. Anak-anak sekarang itu kadang kali, banyak, sebagian besar anak itu enggan mengkonsumsi sayur-sayur, susah dorang lebih banyak makanan-makanan instant yang ada di toko walaupun makanan daging itu juga lebih banyak mereka lebih suka itu daging olahan, daging segarnya kurang. Itu karena itu, Disamping ya kalau di desa-desa itu faktor kemiskinan ya mungkin sekitar 50% saja penyebabnya.

P : Menurut anda siapa yang paling berpengaruh besar dalam kasus gizi buruk ini?

N : Berpengaruh maksudnya?

P : Dalam kasus gizi buruk ini yang paling berpengaruh ini mungkin orang tua atau pemerintah?

N : Kalau menurut saya orang tua, karena orang tua yang 1 x 24 jam bersama anak-anak. Jadi orang tua yang tau, oo supaya anaknya jangan gizi buruk kita harus memberikan makan seperti ini, nanti dalam perjalanan orang tua terutama mereka-mereka yang hidup di desa. Sebenarnya telur ayam itu punya nilai gizi buat anak, tapi orang tua lebih mengutamakan telur ayamnya dijual lalu membeli sarimie untuk anak makan. Cara hidup seperti ini ni yang menimbulkan gizi buruk. Jadi semua itu ada pada orang tua, orang tua yang paling tau, paling bertanggung jawab lalu berikut mungkin intervensi pemerintah, dalam hal ini yang paling dekat bersama masyarakat itu Posyandu, tapi sekarang itu Posyandu tidak terlalu banyak mengurus hal-hal seperti itu. Posyandu saya lihat lebih cenderung menimbang anak, mencatat dalam buku kontrol lalu sudah, selesai. Tidak segenyar dulu dimasa kepemimpinan Suharto, Posyandu betul-betul hidup. Jadi kehidupan anak itu betul-betul dipantau perkembangannya seperti apa.

P : Independensi dari Media menurut Pos Kupang bagaimana? Misalnya PK tidak menjadi corong bagi siapapun, tapi lebih berpihak pada kebenaran atau bagaimana?

N : Pos Kupang itu, kalau melihat kasus gizi buruk. Itu-itu, Pos Kupang biasanya memberikan tempat yang strategis karena itu merupakan kasus-kasus kemanusiaan. Jadi independensi kita, kita itu betul-betul mendorong dengan pemberitaan supaya penderita gizi buruk itu mendapat penanganan secepat mungkin, mendapat perhatian dari berbagai macam pihak. Selama ini, kami di Pos Kupang kalau namanya berita-berita terkait dengan kasus gizi buruk atau masalah kemanusiaan lain itu kita biasanya berikan tempat. Ketika kasus gizi buruk itu sudah cukup gawat darurat biasanya itu *Headline* halaman satu, kalau pun tidak itu pasti halaman-halaman dalam itu memberikan tempat yang baik. Itu wujud dari independensi Pos Kupang sendiri.

P : Apa yang melatarbelakangi Pos Kupang tetap mengangkat kasus gizi buruk dalam agenda pemberitaan?

N : Yang melatarbelakangi, itu latar belakangnya nilai kemanusiaan, *human interest* itu tinggi. Sehingga kita tidak bisa membiarkan itu. Saya contoh saja, sapi saja mati itu Pos Kupang itu memberikan tempat, apalagi manusia. Kalau sapi itu mati dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang sekejap itu

biasanya Pos Kupang memberikan tempat, apalagi manusia, karena bicara gizi itu kan menyangkut manusia. Itu latar belakang Pos Kupang memberitakan, itu *human interest*.

P : Bagaimana anda menggambarkan balita yang menderita gizi buruk?

N : Ya pandangan saya balita gizi buruk itu harus secepatnya diperbaiki. Kondisi mereka yang mungkin hanya kulit membalut tulang, postur tubuh yang perutnya membuncit itu harus cepat supaya kita tangani. Pihak-pihak yang terkait itu bertanggung jawab misalnya rumah sakit, puskesmas itu harus cepat menangani hingga kondisi fisik seperti itu harus segera berubah, mereka kembali normal. Lalu kalau sudah normal pun jangan dibiarkan, jangan dilepas langsung begitu tapi harus di kontrol terus sampai mungkin usia mereka misalnya dibawah lima tahun ya bisa dikontrollah sampai usia di atas enam tahun lah baru dilepas, jangan sampai. Selama ini kan penanganannya temporer saja, ya sifatnya kalau ada kasus, semua tergerak kesana tapi ketika kasus itu mendapat diatas ini, ya sudah. Ya begitu...

P : Bagaimana anda menggambarkan instansi kesehatan dalam kasus gizi buruk?

N : Ya, saya lihat kesehatan itu lebih cenderung menjadikan kasus gizi buruk itu menjadi proyek saja. Tidak terpanggil secara nurani, secara kemanusiaan betul-betul bahwa mereka adalah instansi yang harus bertanggung jawab penuh terhadap persoalan itu, tidak, saya lihat cenderung hanya orang dinas ini hanya menjadikan itu sebagai proyek. Dengan data gizi buruk tahun ini, misalnya tahun 2010 sekian, itu angka itu sudah menjadi senjata buat dinas ini untuk memperjuangkan alokasi APBD 2011 penanganan gizi tapi ketika diterima, dana yang diplotkan itu tidak serta merta semuanya itu untuk gizi buruk lebih banyak untuk perjalanan dinas, untuk kepentingan administrasi yang memang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh dinas itu sendiri. Saya melihat banyak kasus-kasus gizi buruk itu hanya lebih cenderung untuk diproyek saja. Dia kirim laporan ke pemerintah pusat supaya DAU dengan DAGnya itu bisa ditambah. DAKES, Dana Alokasi khusus untuk penanganan bidang kesehatan naik, hanya itu saja. Penanganan sampai tuntas itu tidak ada, orientasi yang teknis itu tidak ada.

P : Bagaimana anda menggambarkan pemerintah daerah dalam kasus gizi buruk?

N : Pemerintah daerah dalam kasus gizi buruk itu. Ketika kasus itu mencuat di media massa, itu konsentrasi penanganannya komperhensif tapi ketika media mengabaikan itu biasanya pemerintah juga ya apatis saja. Paling ketika ada orang ini gizi buruk ya kasih makan, kasih susu, drop habis, bantuan habis sudah selesai. Tidak ada penanganan lanjutan. Memang di NTT itu, bagian dari tekad pemerintah juga peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, salah satunya itu kan gizi buruk. Dengan program mereka itu revolusi KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Jadi, anak ini biasanya diperhatikan gizinya, ibu juga, ibu hamil itu juga diperhatikan gizinya, supaya anak yang dilahirkan itu gizinya baik, cuman itu tidak secara serentak, secara keseluruhan, jadi belum merata. Begitu...

P : Bagaimana pelibat masyarakat (balita yang menderita gizi buruk), instansi kesehatan, serta pemerintah daerah diposisikan dalam berita kasus gizi buruk?

apakah sebagai pihak yang dirugikan atau pihak yang bertanggung jawab atau bagaimana?

N : Siapa?

P : Ya itu instansi kesehatan, pemerintah daerah, balita gizi buruk?

N : Itu biasanya kita posisikan mereka itu sebagai instansi teknis yang punya tanggung jawab sehingga kita mendorong supaya mereka meningkatkan kinerja kerjanya. Lebih khusus bagaimana supaya memberikan penanganan-penganganan segera dan penanganan lanjutan supaya kasus gizi buruk ini tidak ada lagi di NTT. Pemerintah, dinas kesehatan itu kita dorong, dorong melalui berita saja. Kalau mereka penanganannya tidak cepat kita bilang kalau ini pemerintah apatis, atau bagaimana sesuai dengan trik pemberitaan media.

P : Kalau balita gizi buruk sendiri, sebagai pihak yang dirugikan atau?

N : Sebenarnya balita gizi buruk itu kan dia kan yang dirugikan. Kenapa? Mereka balita itu kan ketergantungan hidupnya itu betul-betul 100% kepada pihak lain, orang tua, pemerintah, sesama, lingkungan. Mereka kan belum bisa mandiri, tapi ketika mereka dibiarkan, gizinya tidak diperhatikan berarti itu sama dengan pembunuhan karakter sebenarnya, pembunuhan generasi. Jadi mereka berada di posisi yang betul dirugikan.

P : Trus pihak yang bertanggung jawab seharusnya instansi kesehatan atau pemerintah daerah sebenarnya?

N : Secara teknis harusnya instansi kesehatan, tapi secara kebijakan pemerintah daerah. Jadi kebijakan itu misalnya kebijakan anggaran itu harus pemerintah daerah: Gubernur, para Bupati, Walikota. Tapi teknis pelaksanaannya harus tetap di dinas kesehatan. Dia yang yang tim lapangannya.

P : Apakah dalam pemberitaan Pos Kupang selalu memberikan porsi yang sama (cover both side)?

N : Iya, itu kita mengedepankan, dalam hal apa saja Pos Kupang itu mengutamakan itu.

P : Pernahkah Pos Kupang diprotes oleh pihak-pihak yang diberitakan? Lantas, bagaimana cara Pos Kupang menyikapinya?

N : Selama ini hampir tidak ada, karena berita kita itu faktanya kuat.

P : Bagaimana respon pembaca Pos Kupang terhadap berita-berita mengenai gizi buruk selama ini?

N : Sebenarnya bagus, bahkan ada yang ketika kita tidak membuka dompet bencana itu pun ada yang menelpon ke redaksi mau memberikan sumbangan kepada korban gizi buruk di daerah mana yang sesuai pemberitaan koran. Baik responnya, bagus. Ada, ketika kita menurunkan berita itu, biasanya respon cepat itu dari ibu-ibu, ibu-ibu rumah tangga itu cepat. Dorang menelpon kesini, bagaimana cara supaya kami bisa menyalurkan bantuan untuk anak-anak gizi buruk yang diberitakan di koran. Nanti kita arahkan, nanti dia mau menyerahkan ke kami, mungkin ke langsung ke dinas kesehatan, atau ke posyandu tempat tinggal penderita gizi buruk itu. Itu responnya. Respon dari pemerintah juga cepat biasanya. Ketika kita beritakan gizi buruk misalnya di Rote, itu pemerintah propinsi dia langsung, gubernur

pasti langsung panggil dinas kesehatan cepat kesini, itu responnya. Jadi ya setiap berita gizi buruk itu selalu mendapat respon dari pembaca.

P : Apakah prinsip mengutamakan kepentingan publik menjadi patokan untuk memuat suatu berita? kaitannya dengan kasus gizi buruk?

N : Ya...ya...itu menjadi patokan. Itu sesuai dengan visi dan misi lahirnya Pos Kupang di NTT.

P : Itu sama halnya dengan pemberitaan mengenai kasus gizi buruk?

N : Iya

P : Menurut anda, apakah agenda besar dari PK terkait pemberitaan gizi buruk di NTT?

N : Ya, agenda besar. Kami itu biasanya setiap kali peristiwa itu, kita selain punya agenda menurunkan berita-berita yang bersifat *straight news* kita biasanya menugaskan wartawan kita di tempat itu untuk menggali lebih dalam, apa akar permasalahannya? Itu agenda kita itu biasanya mengagendakan berita gizi buruk itu sistimnya harus tuntas. Jadi kita tidak mengangkat hanya sekedar di permukaan tidak, berusaha supaya menggali lebih dalam penyebabnya apa, sehingga pengambil kebijakan itu dia betul-betul mengerti, oh iya ternyata gizi buruk yang terjadi di daerah ini bukan karena kemiskinan tapi karena pola asuhnya yang salah. Ada yang pola asuhnya baik, tapi karena kemiskinan, tinggal dicari jalan keluarnya.

P : Selama ini apa sudah pernah ada laporan khusus mengenai gizi buruk?

N : Setiap kali peristiwa biasanya. Kalau yang di Pos Kupang yang kami namakan tulisan namanya Angker, yang ini, itu selalu mengulas tentang hal. Ada gizi buruk pasti ada ulasan khusus, itu diturunkan disini, itu rutin. Pos Kupang itu sudah punya, itu rubrik tetapnya pos kupang. Jadi, yang ada disini biasanya mengupas tuntas permasalahan yang angkat disini. Harian, itu digali lebih dalam masuk dalam tulisan-tulisan angker.

P : Bagaimana mengatasi perbedaan frame antara reporter dengan redaktur?

N : Sepertinya kami disini ini sudah punya satu *frame* jadi kalau beda pun, beda dalam cara menuangkan saja, tapi substansinya itu sama.

P : Satu frame itu apa?

N : Itu kita memberikan porsi yang betul-betul porsinya itu lebih besar dari berita-berita lain. Yang namanya kasus gizi buruk, kasus-kasus kemanusiaan itu kita harus memberikan porsi lebih besar, kita itu sama. Dan reporter kita sudah tau kalau masalah gizi buruk dia akan garap apa-apa saja, artinya sudah tinggal redaktur itu mengeditnya, melengkapi saja. Misalnya dia tidak menyebutkan angka, data, ya redaktur dia bisa menambahkan gizi buruk di NTT berapa, kabupaten A, kabupaten B berapa?

P : Apakah jurnalis memiliki wewenang dalam menentukan narasumber mana yang berkompeten dan layak diwawancarai? Ataupun ada penugasan khusus dari tim redaksi untuk mengarahkan narasumber-narasumber yang dituju?

N : Iya, 100% punya kewenangan, walaupun terkadang harus ada intervensi dari redaktur, dari rapat redaksi.

P : Kalau intervensi-intervensi seperti itu biasanya dalam kasus seperti apa?

N : Ya misalnya, kalau dalam kasus gizi buruk kita ada narasumber yang dilupakan ya kita beritahu. Biasanya narasumber yang dilupakan itu orang

tua. Begitu kasus, biasanya reporter itu lebih cenderung ketika ada kasus ini konfirmasinya ke pejabat birokrat, melupakan orang tua. Itu yang biasa kita ingatkan, jangan lupa, orang tua, pola asuh mereka seperti apa. Lalu melihat lagi latar belakang kehidupan jangan sampai anak gizi buruk terjadi di tengah kemewahan kehidupan orang tua dalam rumah. Orang tua misalnya lengkap punya hidup seperti ini televisi, parabola, semua, rumah tembok tapi didalam situ ada anak gizi buruk itu berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa gizi buruk karena pola asuh yang salah.

P : Profile seperti apa yang ingin digambarkan Pos Kupang dalam menyosokan ketiga pelibat wacana (balita penderita gizi buruk, pemerintah daerah, serta instansi kesehatan)?

N : Profilnya itu kita menulis terutama kalau penderita gizi buruk itu, kita lebih menonjolkan bagaimana e mengupas tentang penderitanya. Sebagai seorang anak yang memang punya hak hidup, punya hak mendapatkan kesehatan yang baik tapi dia harus menderita karena kelalaian orang tua apalagi pemerintah. Lalu berikut, kepada pemerintah yang memang betul-betul konsen terhadap itu, itu kita memberikan tempat, kita menulis atau membuat profil macam orang-orang yang punya kepedulian terhadap itu. Kalau disini tu ada satu panti asuhan, panti gizi buruk di TTU itu selalu kita kasi tempat yang bagus untuk mereka.

P : Kalau instansi kesehatan?

N : Instansi kesehatan ya terkadang ya kalau memang mereka ini, kita menyatakan bahwa penanganannya tidak becus.

P : Lebih banyak mana? Penanganannya tidak becus atau?

N : Iya, karena kebanyakan dari dinas kesehatan kurang terlalu konsen.

P : Menurut Pos Kupang bagaimana posisi pemerintah daerah serta instansi kesehatan dalam kasus gizi buruk?

N : Mereka. Itu harus sebagai pengayomlah.

P : Seberapa besar peran mereka dalam kasus ini? bisa dijelaskan sedikit?

N : Peran pemerintah, besar dalam prosentase mungkin belum sampai 50%. Sifatnya itu, dadakan saja. Hari ini kami beritakan gizi buruk, besok mereka dapat perjalanan dinas ke lokasi, pulang membuat laporan lalu setelah membuat laporan, menurunkan bantuan selesai. Biasanya begitu.

P : Tidak ada bantuan lanjutan?

N : Pendampingan lanjutannya hampir tidak ada.

P : Bagaimana Pos Kupang memposisikan diri dalam kasus ini?

N : Sebagai kontrol, pengontrol.

P : Apa pendapat anda mengenai kinerja pemerintah daerah dalam kasus gizi buruk?

N : Saya melihat kinerja pemerintah itu belum sampai 50% karena itu mungkin sudah budaya yang ditimbulkan dalam birokrat. Mental proyeknya lebih besar daripada panggilan kemanusiaan.

P : Bisa dianggap buruk?

N : Mau dianggap buruk, tidak terlalu buruk tapi masih biasa-biasa saja.

P : Apa pendapat anda mengenai kinerja instansi kesehatan (rumah sakit, puskesmas) dalam kasus gizi buruk?

- N : Ya, sama juga.
- P : Apa pendapat anda mengenai balita yang menderita gizi buruk dalam kasus gizi buruk?
- N : Ya, saya tidak tau angka secara real. Tapi laporan paling terakhir itu menurun sekitar 10-20%.
- P : Mengapa berita mengenai pernyataan rumah sakit akan merawat balita gizi buruk (PK, 15 September 2008) dan pernyataan walikota Kupang untuk menanggung biaya pasien gizi buruk (PK, 25 September 2008) bisa menempati halaman utama pada bulan September 2008?
- N : Iya, itu tadi karena misinya Pos Kupang itu, mengemban misi kemanusiaan tadi karena bicara gizi itu bicara manusia kan. Seperti saya bilang tadi, sapi saja mati kami kasi tempat yang bagus kenapa manusia tidak. Itu sesuai dengan misi kita. Jadi kalau hal-hal yang terkait dengan gizi buruk, terkait dengan kemanusiaan, itu selalu mendapat tempat yang baik dari Pos Kupang.
- P : Bagaimana pandangan SKH Pos Kupang (sebagai media massa) mengenai kasus gizi buruk di Nusa Tenggara Timur?
- N : Pandangan kita. Ya, kita sih secara lembaga itu menginginkan supaya tidak ada lagi penderita gizi buruk di NTT. Itu pandangan media, tapi kalau faktanya ada, itu kita berupaya supaya mendorong semua pihak tidak hanya pemerintah tapi mungkin ada orang tua, LSM supaya secepatnya menangani itu supaya NTT bisa keluar dari masalah gizi buruk.

Rutinitas redaksional Pos Kupang

- P : Bagaimana mekanisme rapat redaksi dan kebijakan redaksional?
- N : Rapat redaksi itu, pagi itu biasanya ada rapat perencanaan peliputan. Lalu ada siang itu ada rapat semacam rapat evaluasi hasil. Lalu malam itu rapat tata wajah sekalian pembahasan agenda yang perlu di *follow up*. Itu rapat kita, lalu rapat itu kita bisa menyepakati kira-kira redaksional yang perlu kita turunkan untuk masalah ini apa? Arahnya kemana?
- P : Dalam rapat redaksi apa saja yang dibahas?
- N : Itu tadi, kebijakan kita itu, kebijakan mengutamakan berita-berita yang menyentuh langsung kemanusiaan. Jadi, biasanya masalah gizi buruk dengan peristiwa gubernur meresmikan apa begitu, itu pasti gizi buruk yang menempati tingkat paling atas ketimbang acara itu.
- P : Siapa yang memimpin rapat redaksi?
- N : Rapat redaksi dipimpin oleh redaktur piket setiap hari. Macam ini hari saya yang piket, nanti saya yang pimpin, tadi pagi sampai malam.
- P : Apakah semua wartawan diwajibkan datang?
- N : Wajib, walaupun mungkin kenyataannya berhalangan itu kita tapi selalu dikomunikasikan. Tetapi harus, wajib, untuk rapat pagi itu wajib hadir. Kalau rapat siang itu lebih banyak para redaktur, dilihat mana yang kurang ditagih ke reporter. Rapat malam juga para redaktur
- P : Sejauh mana keterlibatan wartawan dalam rapat redaksi?
- N : Ya, wartawan itu kan memberikan informasi-informasi, masukan-masukan. Kira-kira apa yang mereka temukan di lapangan seperti apa untuk kita diskusikan bersama.

P : Bagaimana suasana rapatnya?

N : Suasana rapatnya terkadang itu ada dinamikanya, tapi ketika terkadang itu kalau reporternya lagi jenuh monoton penugasannya. Penugasan dari sini...sini...sini... selesai. Jadi situasional sekali suasananya. Tapi lebih banyak itu rapat kita mengharapkan kita membangun komunikasi antara redaktur dengan reporter didalam forum rapat itu sendiri. Nah ada yang kita tidak tau, kita kan lebih banyak berada disini, di kantor. Mereka yang tahu di lapangan tolong beritahu supaya kita bisa mengatur perencanaan peliputannya seperti apa.

P : Apakah ada training untuk jurnalis Pos Kupang?

N : Pelatihan lama. Seleksinya itu cukup ketat lah, lama. Dan biasanya dalam perjalanan itu seleksi-seleksi alam itu berlaku. Jadi yang bertahan itu sudah lolos seleksi alam semua.

P : Bagaimana penentuan sebuah berita masuk ke halaman apa? Siapa yang menentukan rubrikasi hingga pemilihan headline di Pos Kupang?

N : Itu ditentukan lewat rapat redaktur. Penentuannya itu dilihat dari kuat tidaknya berita itu, kuat tidak kelengkapannya, lalu dia punya efeknya.

P : Kalau berita-berita di halaman yang dalam?

N : Halaman dalam itu lebih banyak diatur diatur oleh redaktornya sendiri. Tapi lebih banyak redaktur-redaktur di Pos Kupang itu menempatkan peristiwa-peristiwa kemanusiaan itu menjadi, mendapat tempat yang paling strategi. Biasa didalam pun pasti HL (*Headline*) halaman dalam. Kalau gizi buruk hanya satu orang pasti di halaman dalam. Satu, dua orang di halaman dalam tapi pasti tempatnya dikasih besar HL.

P : Bagaimana sistem distribusi SKH Pos Kupang?

N : Distribusi korannya. Setelah dicetak, itu distribusinya bagian sirkulasi langsung berhadapan dengan, berurusan dengan agen-agen. Agen-agen yang menyebarkan itu melalui tenaga pemasaran mereka, ya loper-loper itu. Jadi Pos Kupang dia hanya sampai agen. Titik disitu, agen yang melanjutkan sampai ke pembaca.

P : Bagaimana cara penentuan judul dan sub judul dalam SKH Pos Kupang? Apa saja pertimbangannya? Apakah merupakan otoritas wartawan atau merupakan keputusan redaksi?

N : Melalui rapat tadi, rapat redaksi, terutama rapat malam, rapat terakhir jam 9 itu, itu yang menentukan. Ini judulnya apa, sub judulnya apa.

P : Pertimbangannya apa?

N : Pertimbangannya, pertama itu substansi beritanya, apa substansinya, kelengkapannya seperti apa, lalu dampak dari berita itu seperti apa. Itu yang menjadi pertimbangan.

P : Bagaimana penentuan lead dan paragraf penutup dalam pemberitaan di SKH Pos Kupang?

N : Itu biasanya oleh redaktur yang mengeditnya itu yang mengatur lebih lanjut. Leadnya apa, penutupnya apa.

P : Dalam memilih foto/gambar/tabel apa saja yang menjadi pertimbangan? Apa ada alasan tertentu untuk menonjolkan sesuatu?

- N : Foto itu biasanya yang paling pertama fotonya harus menarik. Menarik itu dalam dua hal, ada foto yang sifatnya foto berita, ada foto yang sifatnya memperkuat beritanya, itu ada. Jadi fisik fotonya itu menjadi penentu. Kalau misalnya momennya bagus tapi fisik fotonya tidak bagus, macam ini semuanya fisik foto yang dipaksakan, tidak bagus dia punya estetikanya, kekuatan fotonya. Tidak ada foto lain yang bisa menyaingi ini sehingga dia diturunkan. Rata-rata kami tu harus memilih foto yang betul-betul punya estetikanya itu yang lebih diutamakan, lalu substansi fotonya. Saya lihat disini juga tidak ada foto yang mendukung. Ini foto berita, foto yang sebenarnya memperkuat berita, bukan foto berita.
- P : Lalu kalau misalnya untuk menonjolkan berita itu biasanya dalam bentuk apa? dalam menonjolkan sebuah berita, misalkan kasus gizi buruk tapi dia di halaman dalam nah untuk menonjolkan berita itu sendiri?
- N : Diberi tempat headline, nanti hurufnya itu lebih besar, lebih tebal, kemudian mungkin dilengkapi dengan tabel-tabel atau data pendukung lain.
- P : Apakah wartawan yang meliput mengenai permasalahan ini ditunjuk langsung oleh redaktur atau ada aturan lain? Apakah ada pertimbangan tertentu dalam memilih wartawan yang meliput kasus ini?
- N : Ditunjuk langsung oleh redaktur.
- P : Apa ada pertimbangan tertentu dalam memilih wartawan?
- N : Tidak kebanyakan lokusnya saja, kalau kejadiannya di Kefa misalnya, itu wartawan yang bertugas disana. Kita belum sampai pada menugaskan wartawan khusus untuk turun kesana. Dan yah kami belum menyiapkan semacam wartawan khusus gizi buruk lah.
- P : Bagaimana kebijakan Pos Kupang dalam pemilihan narasumber soal kasus gizi buruk? apakah ada rating tertentu?
- N : Kebijakan itu sudah melalui rapat tadi. Kalau misalnya narasumber ini pas ka tidak. Misalnya gizi buruk itu narasumbernya jelas, korbannya kalau itu ada orang tuanya, petugas yang menangani itu. Lalu mungkin diperluas lagi ke pemerintah daerah misalnya bupatinya, atau DPRnya. Narasumber itu biasanya ditentukan melalui rapat redaksi.
- P : Kalau mengenai gizi buruk narasumber yang utama itu siapa?
- N : Gizi buruk, narasumber utama biasanya, kami cenderung ke orang tua sekarang, orang tua dari korban, berikut mungkin lembaga-lembaga yang punya kepedulian kesana. Belum tentu langsung pemerintah, karena ada LSM yang mungkin bergerak lebih dulu.
- P : Bagaimana implementasi kebijakan redaksional/politik SKH Pos Kupang dalam memberitakan peristiwa ini?
- N : Implementasinya, ya kita sajikan lewat berita-berita sudah, lalu kita *follow up* tadi sampai pada masalah itu diselesaikan, implementasi kita. Artinya kita tidak membiarkan masalah itu putus di tengah jalan, kalau penanganannya putus pun kita sampaikan, bahwa penanganannya hanya sampai sekian, tidak tuntas.
- P : Apa yang sebenarnya ingin dicapai Pos Kupang dengan pemberitaan mengenai kasus gizi buruk di NTT?

N : Itu hanya yang ingin kita capai itu ada perubahan kebijakan, ada perubahan pola tingkah laku, itu saja. Artinya lalu angka gizi buruk ini semakin hari semakin berkurang. Itu sasaran kita begitu, tujuan kita. Tapi sebenarnya kalau jumlahnya semakin bagus kan menarik buat kita berita. Tapi kan untuk apa kita harus komersialkan manusia yang hidup dalam penderitaan, tidak sesuai dengan visi kita.



BIODATA SUBYEK PENELITIAN

14. Nama Lengkap : Gerardus Manyella
15. Jabatan/Pekerjaan : Redaktur Pelaksana
16. TTL : Maumere, 24 Juni 1969
17. Jenis Kelamin : Laki-laki
18. Agama : Katolik
19. Kota Asal : Maumere
20. Suku : Flores
21. Alamat Rumah : BTN, Kolhua
22. No Telp/Email : 08123799637/ gerard_pk@yahoo.co.id
23. Status Perkawinan : Menikah
24. Jumlah Anak : Satu
25. Masuk PK sejak : 1996
26. Sejarah Pendidikan :
TK : Maumere (tamat)
SD : Maumere (tamat)
SLTP : Maumere (tamat)
SMU : Maumere (tamat)
Perguruan Tinggi : UNDANA
14. Sejarah Pekerjaan :
Tahun Pekerjaan : Pos Kupang
15. Pengalaman Organisasi : PMKRI
16. Aktivitas di luar Pekerjaan : -

TRANSKRIP WAWANCARA

P = Peneliti

N = Narasumber

Wartawan Hermina Pello

P : Mendengar kata gizi buruk, apa yang terpikirkan oleh anda ?

N : Gizi buruk, anak kecil, kurus, terus sakit-sakitan. Itu sudah. Anak kecil yang kurus, kurus sekali dan sering sakit-sakitan. Itu langsung dalam otak tuh langsung, wah itu anak tuh parah.

P : Bisa cerita sedikit apa yang anda ketahui mengenai kejadian gizi buruk di NTT ?

N : Kalau saya, gizi buruk di NTT itu terjadinya, penyebabnya itu pertama karena ada orang tua yang memang betul-betul tidak mampu untuk memberikan asupan gizi yang baik, tapi ada juga orang tua yang mampu tetapi anaknya tidak mau makan dan kurang perhatian dari orang tua sehingga akhirnya anak itu sama sekali kurang dan mempunyai gizi buruk

P : Perkembangan kasus gizi buruk sendiri di NTT bagaimana?

N : Kalau untuk NTT, saya kurang tau karena saya tugasnya di kota jadi saya tidak terlalu urus. Karena tugas saya itu, saya cuman di kota saja.

P : Bagaimana pandangan pribadi anda mengenai kasus gizi buruk di NTT ?

N : Kalau saya, gizi buruk itu ada banyak faktor sekiranya, bukan hanya masalah ekonomi, tetapi menurut saya itu perhatian orang tua lebih utama e, kalau masalah ekonomi, banyak orang yang tidak mampu tapi anaknya juga tidak gizi buruk tapi ada malah orang yang mampu tapi malah anaknya gizi buruk. Menurut saya itu masalah perhatian orang tua, bukan hanya lagi pada masalah ekonomi.

P : Apakah anda tertarik dengan kasus gizi buruk? apa yang membuat anda tertarik terhadap kasus ini? apakah anda mengikuti perkembangan kasus gizi buruk hingga saat ini? bisa ceritakan sedikit....

N : Yah, kalau saya gizi buruk itu langsung merasa sebagai bagian dari itu. Karena saya merasa prihatin, kalau dengar gizi buruk dengan kemana pun saya suka cari tahu gitu, karena sedikit keprihatinan.

P : Selain karena keprihatinan, mungkin ada alasan lain?

N : Karena saya punya anak.

P : Apakah kakak mengikuti perkembangan kasus gizi buruk sampai sekarang?

N : Secara periodik sih tidak e, tapi biasanya beberapa bulan sekali saya sering ke Posyandu-posyandu untuk bertemu dengan ibu-ibu Posyandu karena mereka kan yang lebih tau e.

P : Menurut anda siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam kasus gizi buruk?

N : Yang pertama orang tua, yang kedua itu di posyandu, yang ketiga pemerintah, tapi kayanya pemerintah sedikit sekali e, menurut saya perhatiannya sedikit sekali.

- P : Menurut anda siapa yang paling berpengaruh besar dalam kasus gizi buruk ini?
- N : Untuk gizi buruk, menurut saya orang tua, orang tua yang lebih banyak pengaruhnya.
- P : Bagaimana anda menggambarkan balita yang menderita gizi buruk?
- N : Kondisinya bagaimana, berat badannya, tinggi badan. Walau pun kadang-kadang bagi saya itu bukan hal ini tapi yang pernah lihat kondisinya, kondisi fisiknya yang kurus sekali itu yang paling menonjol. Kalau secara kesehatannya kan saya tidak tahu, tapi paling secara fisik bahwa anak itu sudah kurus tulang-tulangnya sudah tinggal itu lagi, kita bisa langsung tau.
- P : Bagaimana anda menggambarkan instansi kesehatan dalam kasus gizi buruk?
- N : Kalau kesehatan itu kan, saya paling hanya tanya berapa sih dana untuk penanganan gizi buruk, secara ini saya tidak terlalu masuk ke dalamnya, itu hanya paling berapa sih dana, apakah itu cukup atau tidak. Hanya seperti itu saja tetapi tidak terlalu dalam.
- P : Bagaimana anda menggambarkan pemerintah daerah dalam kasus gizi buruk?
- N : Hampir sama, kalau menurut saya. Dan kalau gizi buruk itu kan ada banyak-banyak, ada banyak instansi yang membantu ada dinas kesehatan, ada dinas sosial, lalu dari PKK juga ada, juga dari PNPM juga ada bantuan-bantuan. Tapi menurut saya masih sangat kurang e, perhatiannya masih sangat kurang. Walaupun orang bilang mau kejar NDCS segala macam, tapi menurut saya di lapangan sama saja tuh, telur masih tetap ada juga, anak juga masih gizi buruk.
- P : Menurut anda pihak balita yang menderita gizi buruk, pemerintah daerah, instansi kesehatan (rumah sakit, puskesmas) digambarkan sebagai apa dalam berita gizi buruk di NTT?
- N : Ya kalau untuk, kalau anak sebagai korban. Kalau pemerintah itu kan harusnya orang yang, pihak yang harusnya bertanggung jawab untuk menangani semua itu.
- P : Kalau instansi kesehatan bagaimana?
- N : Ya, sama kalau pemerintah identiknya dengan, dinkes kan identiknya dengan pemerintah. Kan dia juga bagian dari pemerintahan, pemerintah.
- P : Kaitannya dengan profesi anda sebagai jurnalis, dalam meliput kasus gizi buruk apakah anda selalu menempatkan dalam agenda peliputan? Ataukah merupakan penugasan dari redaksi? Bisa dijelaskan...
- N : Kalau gizi buruk itu kadang juga tugas tapi beberapa, ya kalau misalnya saya bertemu dengan dia tidak bukan agenda yang itu tapi ketika saya mendengar ada kasus gizi buruk saya langsung ini. Jadi tergantung informasinya saja kalau misalnya memang ada kasus gizi buruk tapi tidak setiap saat, beberapa bulan sekali itu kalau ketemu dengan orang-orang Posyandu, orang-orang itu, saya selalu tanya-tanya tentang gizi buruk karena mereka yang tau pasti tentang itu.
- P : Biasanya dalam melakukan liputan apakah anda sudah menentukan angle terlebih dahulu ataukah setelah melakukan liputan (melakukan wawancara dan memperoleh data)? bagaimana dengan pengalaman anda sendiri selama meliput kasus gizi buruk?

- N : Biasanya setelah wawancara, pegang data. Kecuali kalau ditugaskan, kalau ditugaskan itu paling tidak sudah punya bayangan tapi kalau misalnya kita bertemu dengan orang, itu biasanya saya belum ada bayangannya setelah itu baru punya bayangan mau tentukan anglenya seperti apa. Makanya tidak baik e kak, harusnya kan angle duluan. Tapi masalahnya saya juga tidak terlalu fokus ke situ kan.
- P : Dalam menulis kasus gizi buruk, aspek-aspek apa saja yang ditonjolkan agar lebih menarik dan aspek mana yang dihilangkan karena dianggap tidak perlu diberitakan?
- N : Biasanya aspek yang kita liput paling mengenai jumlahnya, kadang-kadang jumlah itu menyesuaikan dengan membuat orang tahu memang bahwa gizi buruk itu masih ada, orang tidak bisa menutup mata. Kalau tentang dana-dana sih tidak terlalu tapi hanya saya angkat tentang kehidupannya orang tuanya, kondisi dari anak itu.
- P : Terus kalau yang dihilangkan kerana dianggap tidak perlu diberitakan?
- N : Hmm, kayanya tidak.
- P : Apakah ada ketentuan dalam menyajikan panjang/porsi penyajian pernyataan narasumber? Apakah dengan menempatkan pernyataan narasumber di awal tulisan dengan jumlah paragraf yang banyak, merupakan upaya penonjolan?
- N : Tidak ada.
- P : Kalau dalam penempatan pernyataan narasumber di awal tulisan dengan jumlah paragraf yang banyak itu, apa merupakan upaya penonjolan?
- N : Makin banyak itu kan, orang malah, kalau menurut saya tidak, karena kalau makin banyak itu. Kita disini malah dianjurkan supaya satu paragraf, hanya satu paragraf dan hanya beberapa kata saja. Dianjurkan maksimal 30 kata, walaupun kadang-kadang kita lebih to, tapi dianjurkan supaya tidak banyak-banyak kalimat.
- P : Apakah adakah rutinitas organisasi Pos Kupang yang mempengaruhi anda dalam membuat berita? misalnya untuk kasus gizi buruk, hal apa yang harus diberitakan dan yang tidak boleh diberitakan karena isunya terlalu sensitif?
- N : Saya kira tidak ada.
- P : Atau dalam pemilihan narasumber, apakah dalam rapat redaksi ditentukan pula narasumber yang harus diwawancarai?
- N : Ya kadang-kadang ditentukan, tapi kadang kita inisiatif sendiri. Tergantung kalau misalnya gini kalau itu untuk halaman satu biasanya ditentukan biasanya untuk halaman-halaman gizi buruk itu kan kita sendiri yang menentukan siapa yang kita wawancara, untuk halaman dalam sih.
- P : Apakah ada aturan yang dibuat oleh redaktur bagi wartawan untuk mencari narasumber?
- N : Aturannya ya paling tidak harus *cover both side* itu penyampaian dari beberapa pihak itu yang harus diwawancarakan dalam kasus. Ya, yang punya hubungan langsung dengan kasus itu.
- P : Mengapa ada kecenderungan pemimpin instansi sering dipilih sebagai narasumber terkait soal gizi buruk? apakah ada alasan khusus? Apakah karena wartawan tersebut memiliki kedekatan dengan narasumber tersebut sehingga lebih senang mewawancarai yang bersangkutan?

- N : Ya, karena terkait kebijakan, terkait dana, upaya-upaya yang mereka lakukan.
- P : Atau mungkin ada kedekatan dengan narasumber tersebut sehingga lebih senang diwawancarai?
- N : Saya pikir tidak juga. Hanya itu mereka yang bertanggung jawab to.
- P : Bagaimana penentuan urutan narasumber yang anda tulis ke dalam teks berita?
- N : Tidak ada sesuatu yang harus. Tidak ada aturan baku. Bisa orang dari luar, bisa juga. Tidak ada aturan yang baku.
- P : Apakah jurnalis memiliki wewenang dalam menentukan narasumber mana yang berkompeten dan layak diwawancarai? Ataupun ada penugasan khusus dari tim redaksi untuk mengarahkan narasumber-narasumber yang dituju?
- N : Kalau wewenang sih tidak e ka, tapi jarang kita melihat orang yang bertanggung jawab itu siapa. Ya itu
- N : Kita yang harus lebih jeli melihat siapa yang bertanggung jawab. Tapi kalo dibilang secara spontan e..ka
- P : Apakah ada maksud-maksud tertentu dalam setiap judul dan sub judul yang digunakan dalam pemberitaannya? Jika ada, maksud seperti apa?
- N : Ya, kita maksud lain kita supaya ada perhatiannya kan, ada perhatian terhadap gizi buruk itu. Kalau kita buat berita tanpa ada maksud, ada kebijakan itu apa, kan jadi tidak menarik to, padahal tujuan kita supaya ada perhatiannya
- P : Adakah aturan mengenai panjangnya berita yang ditulis oleh wartawan?
- N : Kalau disini aturannya ada, tetapi kadang-kadang tidak dipake.
- P : Biasanya berapa paragraf?
- N : Tergantung saja, kalau saya tergantung mood, kalau saya kerjanya banyak, kalau tidak ya hanya. Paling kadang-kadang kalau 5 paragraf saya rasa cukup, ya cukuplah, tapi tergantung.
- P : Apakah anda sebagai wartawan pernah menerima tawaran 'suap' dari pemerintah daerah atau instansi kesehatan atau masyarakat? Apa yang lantas anda lakukan?
- N : Suap seperti apa misalnya? contohnya
- P : Misalnya dari instansi kesehatan atau pemerintah daerah?
- N : Waduh ka, kalau suap itu merendahkan harga diri itu. Benar nih, kita ini sudah miskin tapi kalau dalam, menyedihkan sekali.
- P : Sikap kakak kalau misalnya ada hal seperti itu?
- N : Seperti itu, kalau saya sudah, orang-orang sudah lihat saya gerak sudah aneh-aneh itu, biasa langsung muka cemberut dengan saya, langsung rasa rese. Kadang-kadang ada yang sudahlah ibu kadang-kadang, sudah ibu jangan tulis. Itu saya merasa terhina sekali kalau begitu, saya marah sekali, benar ni. Kadang-kadang ada yang bilang sudah lah ibu tidak ditulis satu lembar. Perasaan saya merasa bahwa itu pelecehan yang dihina sekali, saya tidak terima kalau misalnya seperti itu. Walaupun dia omong dengan apapun. Saya rasa terhina sekali.
- P : Apakah dalam pemberitaan Pos Kupang selalu memberikan porsi yang sama (cover both side)?
- N : Kadang tidak, kadang saya akui kalau saya tidak *cover both side*.

P : Alasannya apa?

N : Alasannya kadang-kadang kita kalau cari orang tidak ketemu ya. Memang fasilitas telpon, apa semua. Tapi saya tidak suka menggunakan telpon, karena saya merasa, saya lebih suka bertemu muka dan saya kepingin melihat, menatap wajahnya apa yang dia bicarakan, kalau lewat telpon kadang-kadang kita tidak bisa tahu apa yang orang perhatikan. Kalau misalnya kita ini kita bisa lihat wajahnya, saya bisa ini, apa yang dia omong. Kalau lewat telpon kata saya tidak leluasa e, kadang-kadang. Tidak tentu kadang-kadang ini pulsa mau abis segala macam. Trus itu tu ya kadang-kadang hanya malas saja. Kadang saya pikir ah nanti saja lah kan ini, kantor tidak terlalu memperlumahkan masalah yang sangat saya pikir masalah yang harus cover both side ya iya.

P : Apakah anda pernah memasukan interpretasi pada tulisan berita anda? Apakah sah jika seorang jurnalis memberikan interpretasi dalam beritanya?

N : Kami dilarang to, kalau untuk *straight news* kan kami dilarang untuk memasukan interpretasi. Kecuali mungkin kita menulis *feature* atau apa itu bolehlah kita menulis apa yang kita lihat itu interpretasi kita bilang dia kurus, itu kan pandangan kita. Tapi kalau *straight news* kami dilarang.

P : Apa saja kendala yang anda temukan saat melakukan wawancara dengan pihak instansi kesehatan maupun pemerintah daerah? Apakah anda dihadapkan dengan birokrasi yang sulit saat ingin melakukan wawancara?

N : Kalau kendala, kadang-kadang kita sulit untuk dapat data e. Walaupun mereka bilang tapi sulit sekali kadang-kadang untuk mendapat data. Data mengenai terutama anggaran itu, agak sedikit sulit mereka tidak terlalu terbuka e, anggaran untuk gizi buruk. Mereka hanya bilang oh iya ya. Tapi kalau kita cek kemana-mana gitu, mereka agak sedikit tertutup.

P : Kalau birokrasi sendiri? Pada saat ingin wawancara begitu?

N : Kadang kita sudah kenal, kita bisa tanya tapi untuk kadang-kadang sulit juga untuk mendapatkan data yang sangat baik untuk kita menulis, memberikan perincian itu susah.

P : Apakah anda menerapkan prinsip piramida terbalik dalam tulisan anda? Apa alasannya?

N : Kadang-kadang, itu sih kadang-kadang.

P : Apakah anda setuju jika jurnalis menggunakan insting jurnalistiknya dalam pembuatan maupun penulisan beritanya? Misalnya menentukan isu mana yang menarik untuk diberitakan. Bagaimana dengan pengalaman anda sendiri?

N : Ya, saya pikir itu sesuatu yang harus digunakan. Bukan hanya ini, tapi itu harus itu.

P : Profile seperti apa yang ingin digambarkan Pos Kupang dalam menyosokan ketiga pelibat wacana (balita penderita gizi buruk, pemerintah daerah, serta instansi kesehatan)?

N : Aduh ka, kalau sudah menyangkut Pos Kupang ya ka itu bukan kewenangan saya lagi, itu bukan kewenangan saya, saya tidak berwenang, kalau itu orang lain punya kewenangan. Tugas saya itu hanya sekedar untuk menuliskan berita.

- P : Kalau dalam penulisan selama ini? selama ini menulis profil balita penderita gizi buruk, pemerintah daerah, instansi kesehatan itu seperti apa?
- N : Maksudnya?
- P : Digambarkan seperti apa selama dalam berita-berita yang kakak tulis?
- N : Sebagai orang yang bukan orang, lembaga yang bertanggung jawab untuk masalah kesehatan.
- P : Menurut anda bagaimana posisi pemerintah daerah serta instansi kesehatan dalam kasus gizi buruk?
- N : Posisi?
- P : Posisinya mereka itu dalam kasus gizi buruk? sebagai pihak yang disalahkan atau?
- N : Saya pikir tidak, bukan pihak yang disalahkan, pihak yang bertanggung jawab. Kalau disalahkan kan kita tidak bisa menyalahkan pemerintah karena kan itu juga kalau gizi buruk kadang-kadang juga kurang perhatian orang tua. Tapi itu pihak yang bertanggung jawab, bukan pihak yang disalahkan.
- P : Seberapa besar peran mereka dalam kasus ini? bisa dijelaskan sedikit?
- N : Dalam gizi buruk? Menurut saya mereka ada peran. Oke mereka berperan dalam berbagai hal, dana, sosialisasi, pencerahan-pencerahan dalam masyarakat. Hanya sebatas itu saja.
- P : Apa pendapat anda mengenai kinerja pemerintah daerah dalam kasus gizi buruk?
- N : Kalau kinerjanya ini kan kita harus punya alat ukur to ka. Kalau saya, menurut saya belum maksimal tapi saya tidak berani kalau bilang kinerja kita harus punya alat ukur. Menurut pendapat pribadi bahwa memang belum maksimal.
- P : Apa pendapat anda mengenai kinerja instansi kesehatan (rumah sakit, puskesmas) dalam kasus gizi buruk?
- N : Kalau menurut saya hampir sama, kalau dinas kesehatan itu kan bagian dari pemerintah to yang mengurus kesehatan memang bukan saja dinas kesehatan tapi dia kan yang paling bertanggung jawab.
- P : Pada tingkatan ideal institusi pers, ada yang menghendaki kenetralan dan ada yang menghendaki keberpihakan. Bagaimana menurut anda? lebih pada kenetralan atau keberpihakan?
- N : Dalam kasus gizi buruk?
Susah saya menjawabnya, saya sulit untuk menjawabnya. Tergantung, kadang-kadang tergantung organ lihatlah kebetulan kita keberpihakan itu berpihak pada orang-orang yang kecil, orang-orang yang korban. Jadi dua hal itu, ya kita tidak berusaha menyalahkan siapa-siapa tidak tapi, keberpihakan pada orang-orang kecil itu, bagaimana supaya mereka itu dibantu, begitu saja. Tidak ada maksud lain-lain itu sih.
- P : Bagaimana Pos Kupang memposisikan diri dalam kasus ini?
- N : Kalau menyangkut lembaga, saya tidak ada komentar.

Rutinitas redaksional Pos Kupang

- P : Bagaimana mekanisme rapat redaksi dan kebijakan redaksional?

- N : Ya jelas setiap hari, lalu setiap tiap-tiap bagian kalau saya tu reporter tapi kalau setiap hari itu setiap pagi, minimal satu minggu sekali kami rapat, setiap hari Selasa ada rapat ya rapat malam evaluasi ya apa yang mau dikerjakan untuk misalnya tulisan-tulisan angker atau komunitas atau kampungku. Tapi kalau untuk rapat-rapat redaktur saya tidak tau.
- P : Dalam rapat redaksi apa saja yang dibahas?
- N : Ya, yang dibahas ya mengenai apa yang mau kita angkat untuk besoknya, fotonya seperti apa. Biasanya cuma untuk halaman satu sih, kalau untuk rapat-rapat secara umum tapi kalau untuk rapat dengan redaktur juga ada juga.
- P : Siapa yang memimpin rapat redaksi?
- N : Rapat itu wajib untuk diikuti dan ada orang yang bertanggung jawab untuk memimpin, redaktur piket.
- P : Sejauh mana keterlibatan wartawan dalam rapat redaksi?
- N : Lebih banyak diam, saya lebih banyak diam.
- P : Bagaimana suasana rapatnya?
- N : Ya, baiklah ya. Biasanya diberi kesempatan untuk kita menyampaikan, tapi saya jarang omong. Banyak omong nanti tugasnya lebih banyak.
- P : Apakah ada training untuk jurnalis Pos Kupang?
- N : Iya
- P : Berapa lama?
- N : Satu bulan kayaknya.
- P : Bagaimana penentuan sebuah berita masuk ke halaman apa? Siapa yang menentukan rubrikasi hingga pemilihan headline di Pos Kupang?
- N : Oh itu redaktur.
- P : Bagaimana cara penentuan judul dan sub judul dalam SKH Pos Kupang? Apa saja pertimbangannya? Apakah merupakan otoritas wartawan atau merupakan keputusan redaksi?
- N : Itu tugas redaktur. Kita hanya ambil berita.
- P : Tapi tetap bikin juga?
- N : Iya, tetap bikin, nanti di edit lagi.
- P : Selama ini banyak koreksi?
- N : Kalau saya kerjanya banyak salah, ya banyak koreksinya. Kadang-kadang kita kerja tidak mood yah, jadi itu juga kadang-kadang koreksinya cukup banyak tapi kalau misalnya kita kerjanya agak baik. Tergantung mood saja sih.
- P : Itu sampai mengubah angle kak?
- N : Tidak, tidak merubah angle.
- P : Bagaimana penentuan lead dan paragraf penutup dalam pemberitaan di SKH Pos Kupang?
- N : Iya itu juga sama.
- P : Dalam memilih foto/gambar/tabel apa saja yang menjadi pertimbangan? Apa ada alasan tertentu untuk menonjolkan sesuatu?
- N : Kita hanya tulis saja, nanti mereka yang menentukan. Redaktur juga yang menentukan.

P : Bagaimana implementasi kebijakan redaksional/politik SKH Pos Kupang dalam memberitakan peristiwa ini?

N : Saya *no comment*.

P : Apa yang sebenarnya ingin dicapai Pos Kupang dengan pemberitaan mengenai kasus gizi buruk di NTT?

N : Ini pribadi atau lembaga?

P : Pribadi?

N : Kalau saya tu ingin, saya ingin ada kebijakan, perubahan kualitas penanganan gizi buruk. Hanya itu saja, tujuannya supaya banyak orang bisa dibantu. Hanya itu saja.

P : Selama ini sudah ada penurunan kasus gizi buruk atau masih tetap?

N : Kalau jumlah pasti saya tidak tau.

P : Bulan-bulan ini ada berita mengenai gizi buruk?

N : Bulan ini. Kayanya bulan lalu ya, bulan lalu kayanya ada, tapi bulan lalu ada tapi bulan ini belum.

P : Sudah ganti pemerintahan tapi masih tetap sama saja?

N : Sama saja e.

BIODATA SUBYEK PENELITIAN

27. Nama Lengkap : Hermina D. M. Pello
28. Jabatan/Pekerjaan : Reporter
29. TTL : Kupang, 22 Maret 1973
30. Jenis Kelamin : Perempuan
31. Agama : Kristen Protestan
32. Kota Asal : Kupang
33. Suku : Rote
34. Alamat Rumah : Jl. Tom Pello no.31, Kupang
35. No Telp/Email : hermina_debora@yahoo.com
36. Status Perkawinan : Menikah
37. Jumlah Anak : Satu
38. Masuk PK sejak : Februari 2000
39. Sejarah Pendidikan :
- TK : Kefas (1979)
- SD : SDN 2 Bonipoi (1985)
- SLTP : SMPN 1 Kupang (1988)
- SMU : SMAN 5 Yogyakarta (1991)
- Perguruan Tinggi : UNDANA (1998)
14. Sejarah Pekerjaan :
- Tahun Pekerjaan : - LSM IEHARI (1998-1999)
- Harian NTT Ekspres (1999)
- Pos Kupang (2000-sekarang)
15. Pengalaman Organisasi : -
16. Aktivitas di luar Pekerjaan : -